



KEMKOMINFO

2019 LAPORAN KINERJA



LAKIN|2019

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MAKASSAR

Jl. Raya Malino KM. 18 Borongloe, Kab. Gowa (Telp.) 0411-8210001, (Fax) 0411-861712, email : upt_makassar@postel.go.id

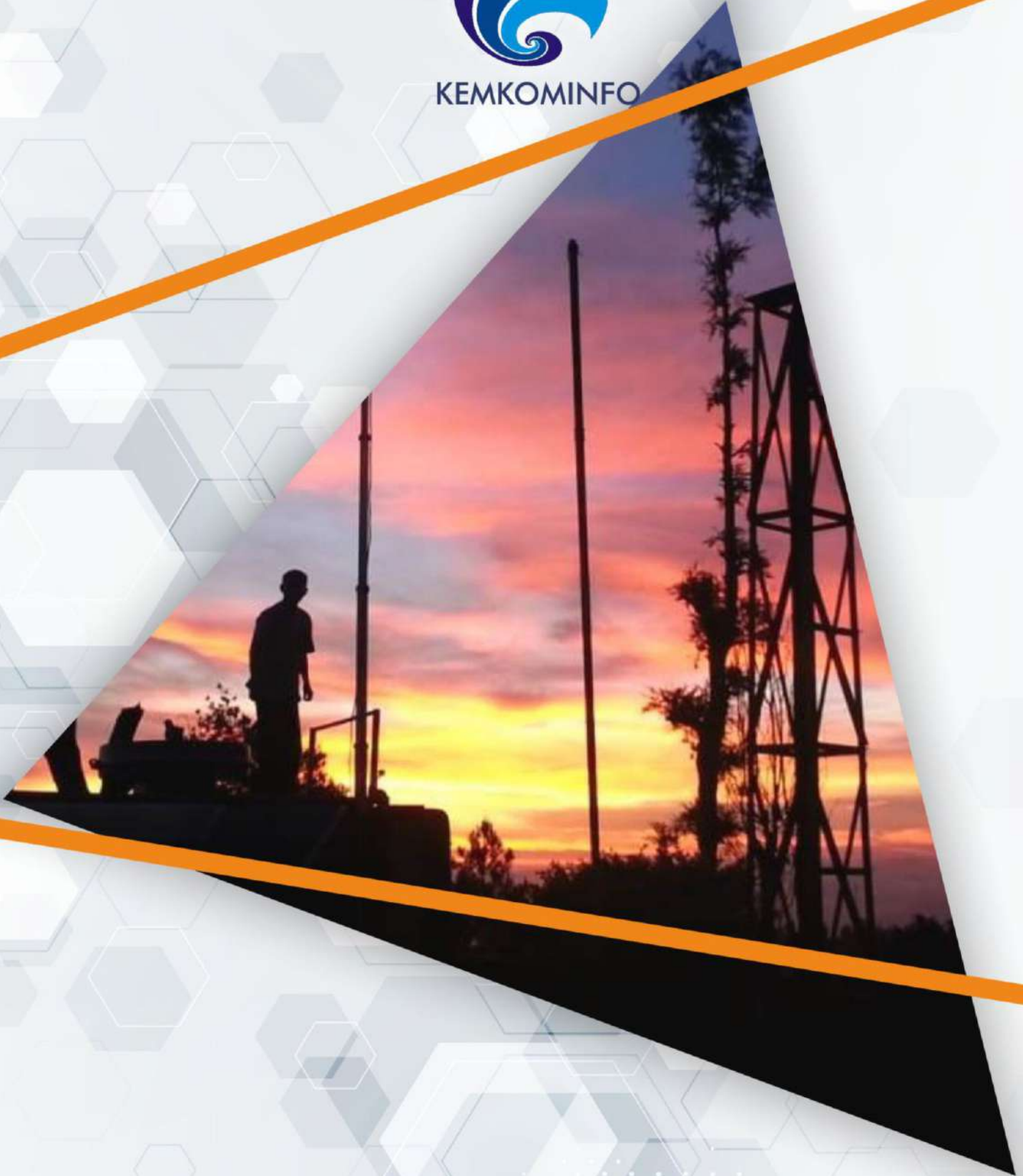


KEMKOMINFO

2019
LAPORAN
KINERJA



KEMKOMINFO



RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Pencapaian PK UPT

Secara spesifik tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) meliputi urusan tata usaha dan kerumahtanggaan termasuk penyusunan rencana dan program, kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, pengukuran stasiun radio, pemantauan atau monitoring dan penertiban frekuensi radio, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, verifikasi dan validasi data pengguna frekuensi radio, evaluasi dan pengujian ilmiah, pelayanan pengaduan masyarakat, serta penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 adalah realisasi program kerja yang berhasil dilaksanakan selama kurun waktu 2019 yang tercermin dalam laporan akuntabilitas keuangan dan laporan capaian kinerja tahun anggaran 2019.

Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 sebesar 98,11% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.036.578.000,- Hal ini menunjukkan indikator keseluruhan program kerja berhasil terlaksana dengan baik.

Penilaian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dapat dilihat dari capaian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019. Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2019	Capaian 2019	Persentase
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1 Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%	96.94%	121.17%
		2 Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%

2	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang Bersih, Efisien dan Efektif	1	Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	100%	100%	100%
		2	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	≥ 94 (dari skala 100)	95.17	101.24%

Tabel 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019

Berikut penjelasan singkat mengenai pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar untuk tahun anggaran 2019.

Pada Sasaran Kinerja 1 **“Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi”** terdapat 2 indikator kinerja. Berikut penjelasan pencapaian masing masing indikator kinerja.

Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT

Pada tahun 2019, Ditjen SDPPI menargetkan 80% kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT. Capaian ini diperoleh dari 8 indikator, antara lain, persentase observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di kabupaten/kota, jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable, jumlah laporan berfungsinya perangkat monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable, persentase stasiun radio penyiaran (radio FM dan TV) yang terukur, persentase tindak lanjut penggunaan frekuensi ilegal, persentase berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT, pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi serta persentase pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR. Untuk tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Makassar telah melaksanakan 32 kegiatan Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika, 5 kegiatan Penertiban Frekuensi Radio dan Tindak Lanjut Hasil Penertiban, 27 kegiatan Pengukuran Frekuensi Radio dan 18 kegiatan Inspeksi Dalam Rangka Validasi Data Izin Stasiun Radio. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 96,94% dari target sebesar 80%. Capaian ini telah melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya.

Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat serta Penanganan BHP Frekuensi Radio

Pada tahun 2019, Ditjen SDPPI menargetkan 100% untuk capaian kinerja pemenuhan pelayanan publik SFR dan perangkat serta penanganan BHP frekuensi radio. Capaian kinerja ini diperoleh dari 5 indikator, antara lain, persentase penyelesaian aduan/klaim dan konsultasi yang diselesaikan, persentase pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan frekuensi radio yang dilaksanakan UPT, jumlah laporan pendampingan KPKNL atas waba yang telah dilimpahkan, jumlah laporan penanganan waba untuk pencegahan dan pengurangan wabah berpiutang serta persentase terlaksananya UNAR. Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%. Indikator kinerja ini telah mencapai target yang telah ditentukan.

Pada Sasaran Kinerja 2 “**Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang Bersih, Efisien dan Efektif**” terdapat 2 indikator kinerja. Berikut penjelasan pencapaian masing-masing indikator kinerja.

Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan

Pada tahun 2019 mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2019, persentase layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan terlaksana 100%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa capaian target layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tercapai. Capaian ini diperoleh 4 indikator, yaitu jumlah dokumen perencanaan program kerja dan anggaran, pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku, jumlah dokumen pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku, jumlah dokumen penatausahaan kepegawaian UPT dan jumlah dokumen keuangan UPT. Pada sisi pengelolaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah merealisasikan penyerapan DIPA Tahun Anggaran 2019 sebesar 98,11%, yaitu Rp. 13.711.088.033,- dari total pagu sebesar Rp. 14.036.578.000,-. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak hanya direfleksikan dengan sekadar menyerap pagu anggaran, tetapi juga memperhitungkan capaian keluaran riil, konsistensi dengan perencanaan, serta upaya efisiensi dalam penyerapannya.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)

Penyempurnaan kualitas pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dengan diimplementasikannya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mulai dilakukan pada tahun 2019. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar mencapai IKPA Score sebesar 95,17 pada akhir tahun anggaran 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I

Makassar berhasil mencapai IKPA Score melebihi target yang ditentukan yaitu 94. Pembobotan IKPA berdasarkan Kementerian Keuangan meliputi realisasi anggaran, tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, LPJ bendahara, renkas, kesalahan SPM, retur SP2D, pagu minus dan dispensasi SPM.

B. Pencapaian Penertiban Nasional Untuk Frekuensi Radio Penyiaran

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas yang mempunyai nilai strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan dikuasi oleh negara, sehingga pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam yang terbatas dalam pemanfaatannya perlu dilakukan secara tertib, efisien dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan dan kerugian dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu dan merugikan penyelenggaraan telekomunikasi, serta penggunaan spektrum frekuensi radio secara ilegal maka operasi penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dipandang perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh UPT Monitor di daerah guna memberikan keamanan dan kelancaran penyelenggaraan telekomunikasi secara umum.

Kegiatan penertiban dilakukan sebagaimana UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Disamping itu, kegiatan penertiban ini terkait dengan Hukum Acara Pidana sehingga dilakukan berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan kegiatan penertiban serentak sebagai suatu rangkaian dari proses manajemen spektrum maupun alat perangkat telekomunikasi.

Pelaksanaan Pekan Tertib Frekuensi 2019 ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk menggunakan frekuensi radio secara legal. Kegiatan penertiban serentak secara nasional ini ditargetkan untuk menurunkan terjadinya gangguan Spektrum Frekuensi Radio akibat pengguna yang tidak memiliki Izin Stasiun Radio dan/atau tidak memenuhi persyaratan teknis.

Penertiban serentak secara nasional itu menasar tiga kelompok pengguna frekuensi, yaitu (1) pengguna frekuensi yang tidak dilengkapi dengan data perizinan, (2) pengguna frekuensi yang beroperasi tidak sesuai dengan peruntukannya, serta (3) pengguna frekuensi yang berpotensi menimbulkan gangguan atau membahayakan keselamatan penerbangan. Oleh karena itu, objek

penertiban mencakup Dinas Siaran (Televisi atau Radio FM), Dinas Tetap (Microwavelink atau Komunikasi Konvensional), dan Dinas Lainnya serta Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar melaksanakan Pekan Tertib Nasional di dua (2) kabupaten, yaitu Kabupaten Gowa dan Kabupaten Barru.

Pekan Tertib Frekuensi Tahun 2019 yang serentak dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2019, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar berhasil melakukan klarifikasi dan penghentian 20 pancaran frekuensi tanpa izin atau ilegal dan 33 perangkat ilegal yang diamankan. Berikut ini daftar pengguna frekuensi ilegal yang diperoleh di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Barru :

Kabupaten Gowa

NO	NAMA PENYELENGGARA	DATA FREKUENSI DAN PERANGKAT			STATUS	NAMA	KETERANGAN
		Tx (MHz)	Rx (MHz)	Merk/Type Perangkat	DISEGEL	PPNS	TINDAK LANJUT
1	PT.XL AXIATA/BASO IHSAN Jalan Garuda Somba opu Gowa	8059.02	7747.7	iPasolink NEC	Tidak ada ISR/Site 3709	Asep, Susi	Telah memiliki ISR dan dibuka segel pada tanggal 14 November 2019
2	PT.XL AXIATA/BASO IHSAN Jalan Aroepala Minasaupa Blok AB Kab. Gowa	23583	22575	iPasolink NEC	Tidak ada ISR/Site5/33 12932G 3G_AROEPA LA	Asep, Asriadi	Telah memiliki ISR dan dibuka segel pada tanggal 14 November 2019
3	PT.XL AXIATA/BASO IHSAN Jalan Poros Mangali Gowa	14777.50	15267.5	iPasolink NEC	Tidak ada ISR/Site 2311494 Mangali	Asep, Dedy	Telah memiliki ISR dan dibuka segel pada tanggal 14 November 2019
4	PT.XL AXIATA/BASO IHSAN Romang Polong Gowa	14623.5	15113.5	iPasolink NEC	Tidak ada ISR/Site 3314280G Romang Polong	Asep, Susi	Telah memiliki ISR dan dibuka segel pada tanggal 14 November 2019
5	PT.XL AXIATA/BASO IHSAN Jalan Pelita Taeng Gowa	7895.95	8207.27	iPasolink NEC	Tidak ada ISR/Site C 779 Taeng	Asep, Dedy	Telah memiliki ISR dan dibuka segel pada tanggal 14 November 2019

6	M. Agus Pramono/RM. Dewi Sri, Jalan Poros Malino Gowa	136.5	136.5	HT Merk Firstcom FC 27	Tidak ada ISR	Asep, Susi	Disegel. BA Tanda Terima, Pemannggilan dan Penyataan. BA.Tanda Terima No.01/Balmon.7 3/10/2019. Masih dalam Proses perizinan
		438.5	438.5				
7	Abd.Muin Aswad/RM.Telaga Barombong Jalan A.Mappainga No.58 Barombong Gowa	136.555	136.555	HT Merk Alinco DJ-W500	Tidak ada ISR	Asep, Susi	Disegel. BA Tanda Terima, Pemannggilan dan Penyataan. BA.Tanda Terima No.02/Balmon.7 3/10/2019 Masih dalam Proses perizinan
8	PT.TELKOMSEL/Erwin Surahman Laode Jalan Poros Malino Pakatto Gowa	8254.03	7942.7	IDU Radiolink Ericcson	Tidak ada ISR Site SNS006 Pakatto	Susi, Asep	Telahmemiliki ISR dan dibuka segel pada tanggal 12 Desember 2019
9		8058.6	7747.28	IDU Radio link Ericcson			
10	NET TV Kab. Takalar	759.25			Ada ISR namun belum mengudara dan tidak memenuhi kewajibanmengudara di wilayah layanannya	Asep, Susi	Sudah ON AIR dan memenuhi kewajiban untuk mengudara pada wilayah layanan sesuai dengan ISR yang dimiliki Mulai ON AIR pada Tanggal 23 Desember 2019

Tabel 2. Daftar Pengguna Frekuensi Ilegal di Kabupaten Gowa

Kabupaten Barru

NO	NAMA PENYELENGGARA	DATA FREKUENSI DAN PERANGKAT			STATUS DISEGEL	NAMA PPNS	KETERANGAN TINDAK LANJUT
		Tx (MHz)	Rx (MHz)	Merk/Type Perangkat			
1	PT.XL AXIATA/Ahmad NursyamJln Poros Barru - Pare Mangkoso Kab.Barru	8147.970	7836.650	iPasolink NEC	Tidak ada ISR/Site Mangkoso Barru	Asep, Dedy	Telah memiliki ISR dan dibuka segel pada tanggal 6 Desember 2019 (5 MW LINK) dan 26 Desember 2019 (1 MW LINK)
		11115.00	11645.00				
		14413.5	14913.5				
		7757.700	78059.02				
		10835	11635				
		11365	10835				
2	PT.INDOSAT/ MUH.IrsyadJln Poros Barru - Pare Mangkoso Kab.Barru	7498.00	7659.00	Ericcson UKY 2200	Frekuensi tidak sesuai dengan ISR	Asep, Dedy	Telah melakukan penyesuaian ISR dengan frekuensi yang terpakai
		7331.00	7170.00				
		172.725	166.725				

Tabel 3. Daftar Pengguna Frekuensi Ilegal di Kabupaten Barru

Assalamualaikum Warahmatullahi Waabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'alam, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar dapat diselesaikan dan dipaparkan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan anggaran di tahun 2019 kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. LAKIN ini merupakan media pelaporan kinerja instansi yang diukur dari pencapaian target kinerja, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditentukan dengan melihat hasil pelaksanaannya selama tahun 2019 yang berkaitan dengan aspek keuangan, kepegawaian, peningkatan SDM, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan perangkat monitoring sistem, penegakan hukum dan pelayanan public serta ketatausahaan yang implementasinya dirinci pada Program Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mengukur kinerja organisasi pada Tahun Anggaran 2019 dengan mengkomparasikan antara tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI dengan target kinerja hasil pelaksanaan selama tahun 2019, dan juga sebagai bahan evaluasi kinerja untuk tahun anggaran berikutnya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019. Kami menyadari bahwa hasil yang diinformasikan dalam Laporan Kinerja (LAKIN) masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun serta mewujudkan laporan yang lebih baik di tahun yang akan datang.

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai yang terlibat maupun yang mendukung penyusunan dan penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019 ini, semoga Allah SWT menilainya sebagai amal ibadah, Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Waabarakaatuh

Kab. Gowa, Januari 2020

Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Makassar

Helmi Wartapane



DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

A.	Pencapaian PK UPT	i
B.	Pencapaian Penertiban Nasional Untuk Frekuensi Radio Penyiaran	iv

Kata Pengantar	viii
-----------------------	------

Daftar Isi	ix
-------------------	----

Daftar Tabel	xi
---------------------	----

Daftar Gambar	xiii
----------------------	------

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang	1
B.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C.	Potensi dan Permasalahan Strategis	4
D.	Sistematika Pelaporan	5

BAB II PERJANJIAN KINERJA

A.	Sasaran Program	7
B.	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.	Capaian Kinerja Organisasi	16
	Sasaran I Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	
1	Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	16
	Persentase (%) Observasi 22 Pita Frekuensi dan Monitoring Frekuensi Berdasarkan ISR di Kab/Kota	17
	Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio dari Setiap Stasiun SMFR Tetap dan Transportable	26
	Jumlah Laporan Berfungsinya Perangkat Monitoring Frekuensi Radio dari Setiap Stasiun SMFR Tetap (Slave) dan Transportable	27
	Persentase Stasiun Radio Penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur	27
	Persentase Tindak Lanjut Penggunaan Frekuensi Ilegal	30

	Persentase Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring / Ukur di UPT	31
	Pelaksanaan Monitoring dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi	33
	Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR	34
2	Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio	35
	Persentase Penyelesaian Aduan/Klaim dan Konsultasi yang Diselesaikan	37
	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang Dilaksanakan oleh UPT	40
	Jumlah Laporan Pendampingan KPKNL atas Waba yang Telah Dilimpahkan	40
	Jumlah Laporan Penanganan Waba Untuk Pencegahan dan Pengurangan Waba Berputang	41
	Persentase Terlaksananya Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)	41
	Sasaran 2 Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspektredrad yang Bersih, Efisien, dan Efektif	43
1	Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	43
	Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Anggaran dan Pelaporan Kinerja	44
	Jumlah Dokumen Keuangan UPT	45
	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN	45
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Kepegawaian	46
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	48
B.	Kinerja Lainnya	50
C.	Realisasi Anggaran	52
BAB IV	PENUTUP	56
Lampiran		

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2019	ii
Tabel	2	Daftar Pengguna Frekuensi Ilegal di Kabupaten Gowa	vi
Tabel	3	Daftar Pengguna Frekuensi Ilegal di Kabupaten Barru	vii
Tabel	2.1	Target dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019	15
Tabel	3.1	Capaian Kinerja Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	16
Tabel	3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT Tahun 2015-2019	16
Tabel	3.3	Subservice/pita target monitoring UPT Ditjen SDPPI untuk tahun 2019	18
Tabel	3.4	Capaian Indikator Kinerja Persentase (%) Observasi 22 Pita Frekuensi dan Monitoring Frekuensi Berdasarkan ISR di Kab./Kota	20
Tabel	3.5	Capaian Kinerja Indikator Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio dari setiap stasiun SMFR Tetap dan Transportable	26
Tabel	3.6	Capaian Kinerja Indikator Jumlah Laporan Berfungsinya Perangkat Monitoring Frekuensi Radio dari Setiap Stasiun SMFR Tetap (Slave) dan Transportable	27
Tabel	3.7	Capaian Kinerja Indikator Persentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang Terukur	27
Tabel	3.8	Capaian Kinerja Indikator Tindak Lanjut Penggunaan Frekuensi Ilegal	30
Tabel	3.9	Capaian Kinerja Indikator Persentase Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring / Ukur di UPT	32
Tabel	3.10	Laporan Service Level Agreement (SLA) Tahun 2019	32
Tabel	3.11	Capaian Kinerja Indikator Pelaksanaan Monitoring dan Penertiban Perangkat	33
Tabel	3.12	Capaian Kinerja Indikator Pelaksanaan Inspeksi Sebagai Tindak Lanjut Validasi Data ISR	34
Tabel	3.13	Resume Hasil Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio Tahun 2019	35
Tabel	3.14	Capaian Kinerja Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio	35
Tabel	3.15	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio tahun 2015 – 2019	36
Tabel	3.16	Capaian Kinerja Indikator Persentase (%) Penyelesaian Aduan/Klaim dan Konsultasi yang Diselesaikan Sepanjang Tahun 2019	38
Tabel	3.17	Capaian Kinerja Penanganan Gangguan Tahun 2015 - 2019	39

Tabel	3.18	Capaian Kinerja Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang Dilaksanakan oleh UPT	40
Tabel	3.19	Capaian Kinerja Indikator Jumlah Laporan Pendampingan KPKNL atas Waba yang Telah Dilimpahkan	41
Tabel	3.20	Capaian Kinerja Jumlah Laporan Penanganan Waba Untuk Pencegahan dan Pengurangan Waba Berpiutang	41
Tabel	3.21	Capaian Kinerja Persentase (%) Terlaksananya Kegiatan UNAR	42
Tabel	3.22	Data Peserta Pelaksanaan UNAR di Kabupaten Soppeng	42
Tabel	3.23	Data Peserta Pelaksanaan UNAR di Kabupaten Luwu Timur	42
Tabel	3.24	Capaian Kinerja Indikator Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	43
Tabel	3.25	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	43
Tabel	3.26	Capaian Kinerja Indikator Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Anggaran dan Pelaporan Kinerja	45
Tabel	3.27	Capaian Kinerja Indikator Jumlah Laporan Dokumen Keuangan UPT	45
Tabel	3.28	Capaian Kinerja Indikator Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN	46
Tabel	3.29	Capaian Kinerja Indikator Jumlah Dokumen Penata usahaan Kepegawaian	46
Tabel	3.30	Jumlah PNS, PPNP, dan Tenaga Outsourcing Tahun 2015-2019	47
Tabel	3.31	Daftar Pegawai Mutasi dan Pensiun Tahun 2019	48
Tabel	3.32	Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Score	48
Tabel	3.33	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator IKPA Score Tahun 2015-2019	50
Tabel	3.34	Pagu Anggaran Per Komponen Kegiatan Tahun 2019	52
Tabel	3.35	Realisasi Anggaran tahun 2019 Per Jenis Belanja	53
Tabel	3.36	Perbandingan Jumlah Realisasi Per Jenis Belanja tahun 2015 – 2019	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Struktur Organisasi Ditjen SDPPI	3
Gambar	1.2	Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas I Makassar	4
Gambar	3.1	Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	20
Gambar	3.2	Capaian Observasi dan Monitoring Kab/Kota TA. 2019	21
Gambar	3.3	Perbandingan Capaian Kab/ Kota Termonitor sejak tahun 2016	22
Gambar	3.4	Rata rata Pendudukan Spektrum di Provinsi Sulawesi Selatan	23
Gambar	3.5	Target ISR Monitor di Provinsi Sulawesi Selatan	24
Gambar	3.6	Capaian ISR Termonitor	25
Gambar	3.7	Capaian Monitoring Stasiun Tetap dan Transportable	26
Gambar	3.8	Radio FM dan TV di Provinsi Sulawesi Selatan	28
Gambar	3.9	Perbandingan Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir Indikator Kinerja Stasiun Radio Penyiaran Terukur	29
Gambar	3.10	Grafik Realisasi Hasil Monitoring Ilegal yang ditindaklanjuti	30
Gambar	3.11	Grafik Capaian Hasil Monitoring Ilegal yang ditindaklanjuti	31
Gambar	3.12	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi	33
Gambar	3.13	Grafik Perangkat Telekomunikasi Legal yang Termonitor	34
Gambar	3.14	Kasus Gangguan di Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2019	39
Gambar	3.15	Indikator Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019	49
Gambar	3.16	Capaian IKPA Scoe Tahun 2019	49
Gambar	3.17	Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2019	53
Gambar	3.18	Grafik Jumlah Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2019	53
Gambar	3.19	Grafik Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2015 - 2019	55
Gambar	3.20	Grafik Disbursement Plan Tahun 2019	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang monitoring frekuensi radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2015-2019. Untuk mewujudkan solusi atas permasalahan pembangunan wireless broadband nasional 2017-2019 secara terarah, sistematis dan berkelanjutan maka dibutuhkan adanya rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan menjadi acuan kebijakan, program dan kegiatan Direktorat Jenderal SDPPI pada periode 2017-2019. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas, maka visi Indonesia Hebat di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika pada RPJMN Tahap III adalah ***terwujudnya piñata kelolaan spektrum frekuensi yang efektif, efisien, dinamis dan optimal serta mendorong penggunaan teknologi inovatif yang memenuhi persyaratan teknis.***

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) merupakan lembaga yang mendapatkan mandat dari Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk mengelola spektrum frekuensi secara terencana sebagai sumber daya alam yang terbatas, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Ditjen SDPPI dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip *good governance*

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal SDPPI, pembinaan administrasi dibawah koordinasi Sekretariat Ditjen SDPPI dan pembinaan teknis operasional dibawah koordinasi Direktorat Pengendalian SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar Tahun 2019 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I

Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Ditjen SDPPI dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, serta sebagai alat untuk mendapatkan masukan dari para *stakeholders* demi perbaikan kinerja Ditjen SDPPI dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

Lebih rinci tugas pokok setiap seksi, antara lain :

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.
2. Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.
3. Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian Izin Stasiun radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

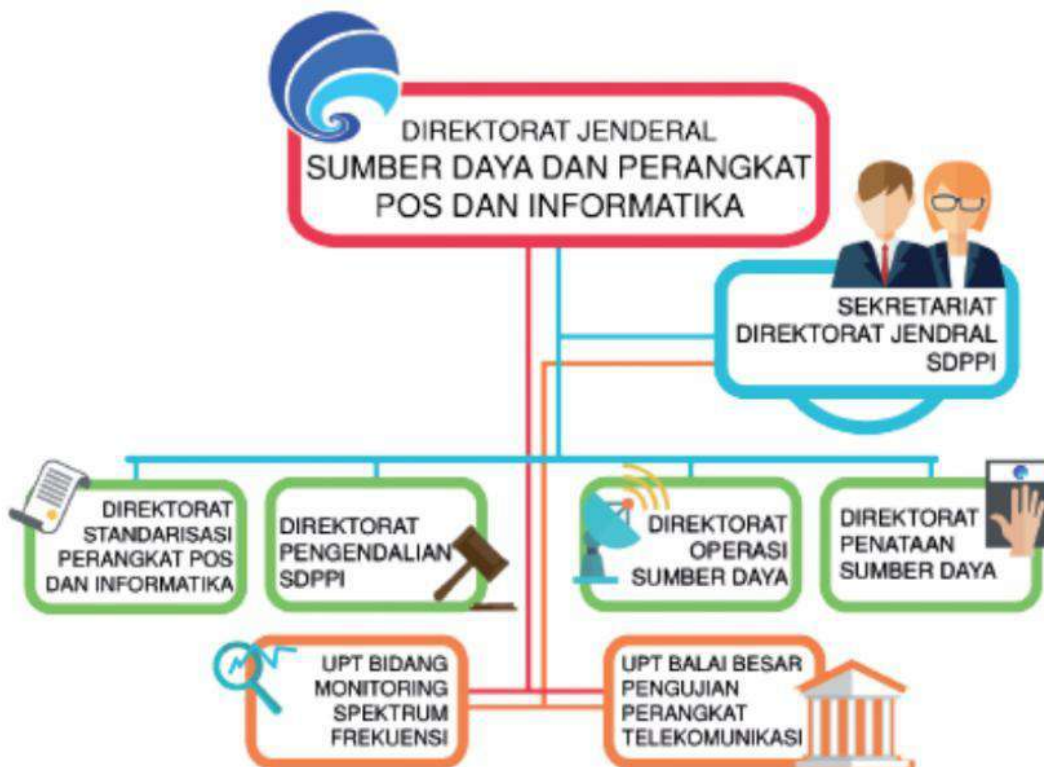
Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;

3. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
4. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
5. Penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio;
6. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
7. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
8. Pelaksanaan ujian amatir radio;
9. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio; dan
10. Pelaksanaan Maritim On The Spot.

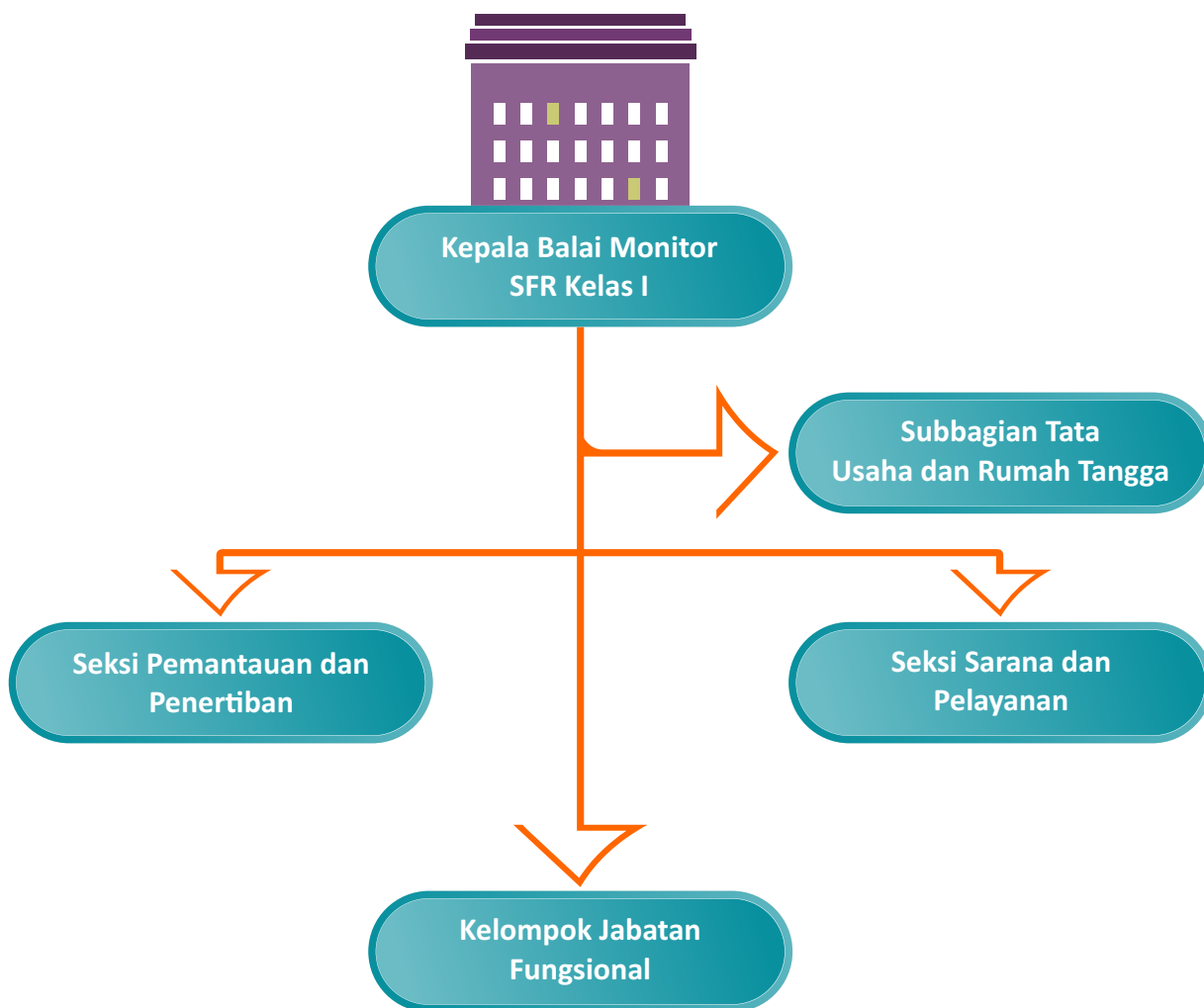
Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah unit kerja setingkat eselon satu yang menjalankan sebagian tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri dari :



Gambar 1.1 :Struktur Organisasi Ditjen SDPPI

Sumber : www.postel.go.id



Gambar 1. 2 :Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas I Makassar

C. Potensi dan Permasalahan Strategis

Untuk menyediakan konektivitas nasional melalui infrastruktur telekomunikasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan yang memanfaatkan berbagai teknologi broadband yang ada, baik berbasis kabel maupun nirkabel (*wireless broadband*). Potensi wireless broadband dalam menyediakan konektivitas nasional amat penting mengingat banyaknya jumlah pulau yang tidak mungkin terjangkau semuanya oleh teknologi broadband berbasis kabel, seperti kabel seratoptik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut, Balai Monitor Spektrum FrekuensiRadio Kelas I Makassar dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Perangkat SMFR pada Balai Monitor Spektrum FrekuensiRadio Kelas I Makassar perlu ditingkatkan atau di upgrade yang sejalan dengan perkembangan teknologi.
2. Penguatan dalam hal perencanaan anggaran dan kegiatan yang perlu ditingkatkan agar seluruh kegiatan program kerja dapat berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
3. Anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi/kemampuan (capacity building) di bidang teknis dan administrasi perlu ditingkatkan.
4. Sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan fungsi perlu ditingkatkan serta diperbaharui sesuai dengan kemajuan teknologi.

D. Sistematika Pelaporan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentangPentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
2. Perencanaan Kinerja yang berisi penjelasan ringkas mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2019.
3. Akuntabilitas Kinerja yang berisi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan indikator kinerja dan realisasi anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
4. Penutup yang berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan ditempuh oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran Program

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya sasaran program dan sasaran kinerja serta Indikator Kinerja Program (IKP) yang disusun oleh Ditjen SDPPI, yaitu :

1. Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
2. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Adapun sasaran dan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya infrastruktur TIK dan pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
2. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.
3. Terwujudnya tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih, efisien dan efektif.

Perjanjian Kinerja Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Makassar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helmi Wartapane
Jabatan : Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ismail
Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
 Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMN 2015 – 2019 dan Renstra 2015 – 2019), sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara berkala dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2019

Pihak Kedua,



Ismail

Pihak Pertama,



Helmi Wartapane

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
(RPJMN 2015 - 2019 DAN RENSTRA 2015 - 2019)**

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MAKASSAR

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%
	2. Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penangangan BHP Frekuensi Radio	100%
Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%
	2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	≥94 (dari skala 100)

Kegiatan	Anggaran
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika	Rp. 14.336.578.000,-

Direktur Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika,



Ismail

Jakarta, Agustus 2019
Kepala Balai Monitor Spektrum
Frekuensi Radio Kelas I Makassar



Helmi Wartapane

Perjanjian Kinerja Sub. Bagian Tata Usaha dan RumahTangga

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wasding

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Helmi Wartapane

Jabatan : Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMN 2015 – 2019 dan Renstra 2015 – 2019), sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara berkala dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Helmi Wartapane

Kab. Gowa, Juli 2019

Pihak Pertama,



Wasding

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
(RPJMN 2015 - 2019 DAN RENSTRA 2015 - 2019)

SUB BAGIAN TATA USAHA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS I MAKASSAR

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.	1. Jumlah dokumen perencanaan program kerja dan anggaran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku	1 dokumen
		2. Jumlah dokumen pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku	1 dokumen
		3. Jumlah dokumen penatausahaan kepegawaian UPT	1 dokumen
		4. Jumlah dokumen keuangan UPT	1 dokumen
		5. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	94 (dari skala 100)

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika	Rp. 11.393.574.000,-

Kepala Balai Monitor SFR Kelas I
Makassar,



Helmi Wartapane

Kab. Gowa, Juli 2019
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai
Monitor SFR Kelas I Makassar



Wasding

Perjanjian Kinerja Seksi Pemantauan dan Penertiban

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Purnomo
Jabatan : Kepala Seksi Pemantauan dan Penertiban Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Helmi Wartapane
Jabatan : Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMN 2015 – 2019 dan Renstra 2015 – 2019), sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara berkala dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Helmi Wartapane

Kab. Gowa, Juli 2019

Pihak Pertama,



Yudi Purnomo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
(RPJMN 2015 - 2019 DAN RENSTRA 2015 - 2019)**

**SEKSI PEMANTAUAN DAN PENERTIBAN BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO KELAS I MAKASSAR**

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) observasi 22 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR di Kab/kota	80%
		2. Jumlah laporan monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12 laporan
		3. Persentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur	35%
		4. Persentase tindak lanjut penggunaan frekuensi illegal	50%
		5. Pelaksanaan monitoring dan penertiban perangkat telekomunikasi	1 laporan
		6. Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR	85%
		7. Persentase penyelesaian aduan gangguan spektrum frekuensi radio	95%

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika	Rp. 1.860.240.000,-

Kepala Balai Monitor SFR Kelas I
Makassar,



Helmi Wartapane

Kab. Gowa, Juli 2019

Kepala Seksi Pemantauan dan
Penertiban Balai Monitor SFR Kelas I
Makassar



Yudi Purnomo

Perjanjian Kinerja Seksi Sarana dan Pelayanan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mangu Purwoko

Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Helmi Wartapane

Jabatan : Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMN 2015 – 2019 dan Renstra 2015 – 2019), sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara berkala dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Helmi Wartapane

Kab. Gowa, Juli 2019

Pihak Pertama,



Mangu Purwoko

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
(RPJMN 2015 - 2019 DAN RENSTRA 2015 - 2019)**

**SEKSI SARANA DAN PELAYANAN BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS I MAKASSAR**

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. 85% berfungsi perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	100%
		2. Persentase (%) Pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang dilaksanakan oleh UPT	100%
		3. Jumlah laporan penanganan piutang yang telah diimpahkan ke KPKNL	4 laporan
		4. Jumlah Laporan Penanganan Tagihan dan Piutang BHP Frekuensi Radio	12 laporan
		5. Persentase (%) pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)	100%

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika	Rp. 1.082.764.000,-

Kepala Balai Monitor SFR Kelas I
Makassar



Helmi Wartapane

Kab. Gowa, Juli 2019

Kepala Seksi Sarana dan Pelayanan
Balai Monitor SFR Kelas I Makassar,



Mangu Purwoko

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja disusun untuk menciptakan tolak ukur penilaian atas kinerja UPT sehingga dapat dilakukan evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja dan target kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Kinerja		Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1	Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%	96,94%	121.17%
	2	Persentase (%) pemenuhan pelayanan publik SFR dan Perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif	1	Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%
	2	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	>94 (dariskala 100)	95,17	101.24%

Tabel 2.1 Target dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Jumlah anggaran yang dikelola oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 14.336.578.000,- (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang kemudian direvisi menjadi Rp. 14.036.578.000,- (Empat Belas Milyar Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara lengkap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

1. Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT

Indikator kinerja kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT terlaksana sebesar 96.94% dari target sebesar 80% dengan persentase sebesar 121.17%.

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	80%	96.94%	121.17%

Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT

Perbandingan capaian indikator kinerja **Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT** selama 5 (tahun) tahun terakhir dapat dilihat pada table dibawah ini :

Indikator Kinerja	2015		2016		2017	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	80%	80%	80%	100%	80%	100%

Indikator Kinerja	2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	80%	100%	80%	121.17%

Tabel 3.2 : Perbandingan Capaian Kinerja Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT Tahun 2015 2019

Penilaian capaian kinerja untuk indikator ini diterapkan mulai tahun 2015 dengan formulasi yang berbeda-beda setiap tahun. 4 (empat) tahun sebelumnya diterapkan formulasi penilaian capaian kinerja yang berbeda. Indikator kinerja ini dicapai dengan memenuhi beberapa kriteria, antara lain :

Persentase (%) Observasi 22 Pita Frekuensi dan Monitoring Frekuensi Berdasarkan ISR di Kab/Kota

Observasi pendudukan pita frekuensi merupakan bagian dari kegiatan monitoring yang dimaksudkan untuk memantau penggunaan spektrum frekuensi pada pita sub-service tertentu di wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan sarana perangkat monitor *portable* melalui pengamatan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam per *subservice*/pita dengan merekam kanal, level serta waktu pendudukannya.

Direktorat Pengendalian SDPPI melalui nota dinas nomor : 068/DJSDPPI.4/ SP.03.03/01/2019 tanggal 30 Januari 2019, menyampaikan 22 *subservice*/pita frekuensi yang harus dimonitor selama tahun 2019 oleh setiap UPT Ditjen SDPPI melalui kegiatan Observasi Monitoring (pengamatan okupansi) dan pengukuran parameter teknis. Adapun 22 *subservice*/pita frekuensi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Subservice	Pita Frekuensi	Kegiatan
1	Maritim, Marabahaya	479 – 526.5 kHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
2	Radio AM	535 – 1606.5 kHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
3	Marabahaya	2173.5 – 2190.5 kHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
4	Penerbangan HF (6 MHz)	6525 – 6765 kHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
5	Penerbangan HF (11 MHz)	11175 – 11400 kHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
6	Radio FM	87.5 – 108 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi, Pengukuran Parameter Teknis
7	Penerbangan VHF	108– 137 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
8	Konsesi, Maritim VHF	150– 174 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi

9	Televisi VHF, DAB	174– 230 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
10	Konsesi, Hankam, Seluler 450	230– 430 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
11	Konsesi, Hankam, Seluler 450	430– 470 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
12	Televisi UHF	478 – 806 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi, Pengukuran Parameter Teknis
13	Trunking, Selular 800	806– 880 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
14	Selular 900	880– 960 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
15	Potensi Broadband 1400	1400– 1520 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
16	Selular 1800	1710– 1880 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
17	Potensi Broadband 1900	1880– 1920 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
18	Selular 2100	1920– 2170 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
19	BWA 2.3 GHz	2300– 2400 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
20	Broadband, SiaranSatelit	2500– 2690 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
21	BWA 3.3 GHz	3300– 3400 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi
22	Potensi Broadband 5 GHz	5140– 5925 MHz	Obsmon (Identifikasi), Okupansi

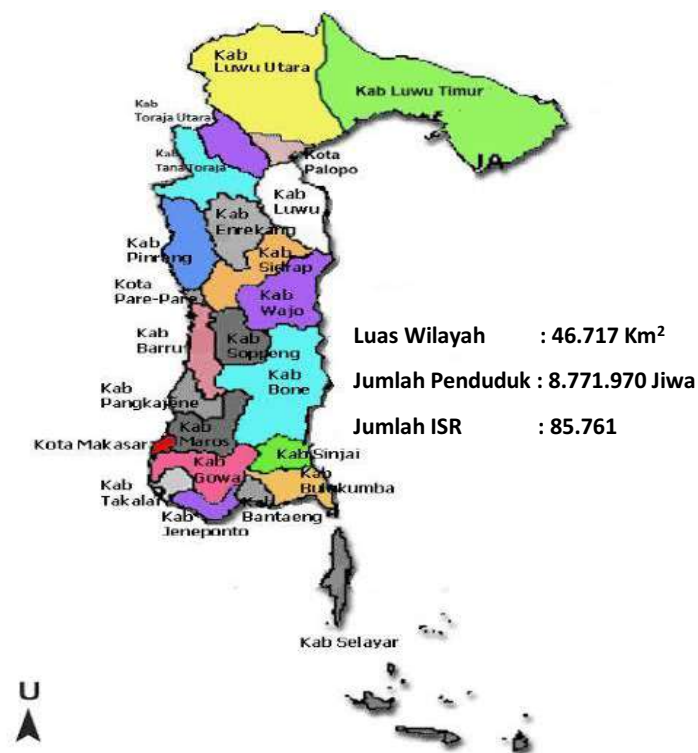
Tabel 3.3. Subservice/pita target monitoring UPT Ditjen SDPPI untuk tahun 2019

Secara garis besar, sasaran dari kegiatan observasi monitoring yang dilakukan di setiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2019 adalah untuk mendapatkan data yang menggambarkan kondisi pemanfaatan frekuensi pada :

a. Dinas Penyiaran;

- AM (535-1606,5) KHz;
- FM (87,5 – 108) MHz;
- TV VHF, DAB+ (174 – 230) MHz;
- TV UHF (478 – 806) MHz;

- b. Dinas Penerbangan;
 - Air Band HF1 (6525 - 6765) KHz;
 - Air Band HF2 (11175 - 11400) KHz;
 - Air Band VHF (108 – 137) MHz.
- c. Band Seluler;
 - Band 450 (430 - 470) MHz;
 - Band 800 (806 - 880) MHz;
 - Band 900 (880 - 960) MHz;
 - Band 1800 (1710 – 1880) MHz;
 - Band 1900 (1800 - 1920) MHz;
 - Band 2100 (1920 – 2170) MHz;
- d. Dinas Tetap
 - BWA 2.3 GHz (2300 – 2400) MHz;
 - Broadband, SiaranSatelit (2500 – 2690) MHz;
 - BWA (3300 - 3400) MHz;
 - Potensi Broadband 5 GHz (5140 – 5925) MHz.
- e. Emergency;
 - Marabahaya1 (479 – 526.5) KHz;
 - Marabahaya2 (2173.5 – 2190.5) KHz;
 - Marabahaya3 (230 – 430) MHz.
- f. Konsesi;
 - Konsesi VHF (150 – 174) MHz;
 - Konsesi UHF (430 – 470) MHz.



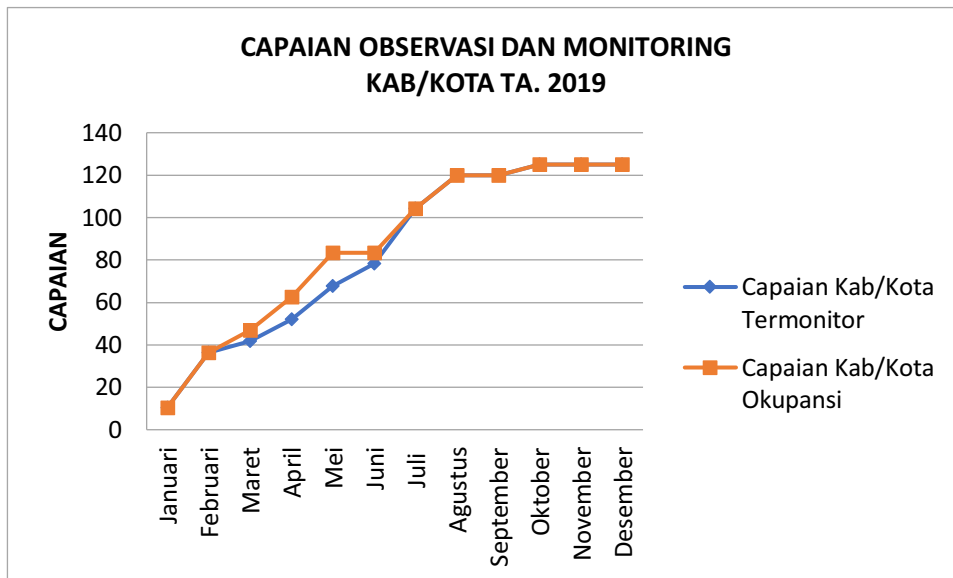
Gambar 3.1. Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 24 Kabupaten/Kota dengan tingkat kepadatan frekuensi tertinggi terdapat di Kota Makassar, sebesar 38.44 % dari total ISR di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2019, Target Kinerja untuk Indikator Kinerja Observasi 22 Pita Frekuensi dan Monitoring Frekuensi Berdasarkan ISR di Kab/Kota adalah sebesar 80% setara dengan 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Balmon Makassar mampu memonitor seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 ini, sehingga capaian Kinerja Balmon Makassar mampu mencapai 125% dari target yang telah ditetapkan.

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	Persentase (%) Observasi 22 Pita Frekuensi dan Monitoring Frekuensi Berdasarkan ISR di Kab/Kota.	80 %	100 %	125

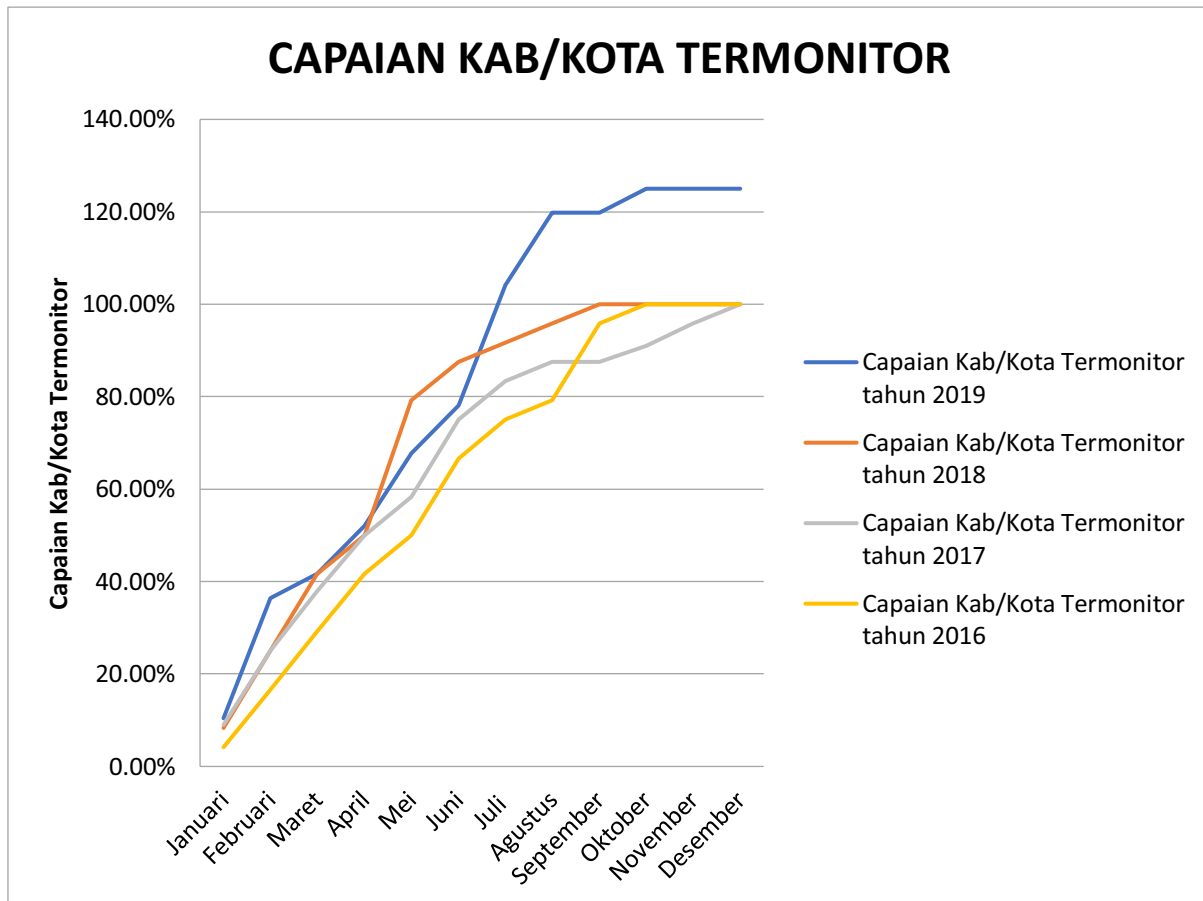
Tabel 3.4 : Capaian Indikator Kinerja Persentase (%) Observasi 22 Pita Frekuensi dan Monitoring Frekuensi Berdasarkan ISR di Kab./Kota

Target 80 % pada Indikator Kinerja ini juga mencakup kegiatan Monitoring okupansi pada 22 pita frekuensi di Kabupaten/Kota yang termonitor, 40 % ISR Termonitor dan 90% Identifikasi hasil Monitor.



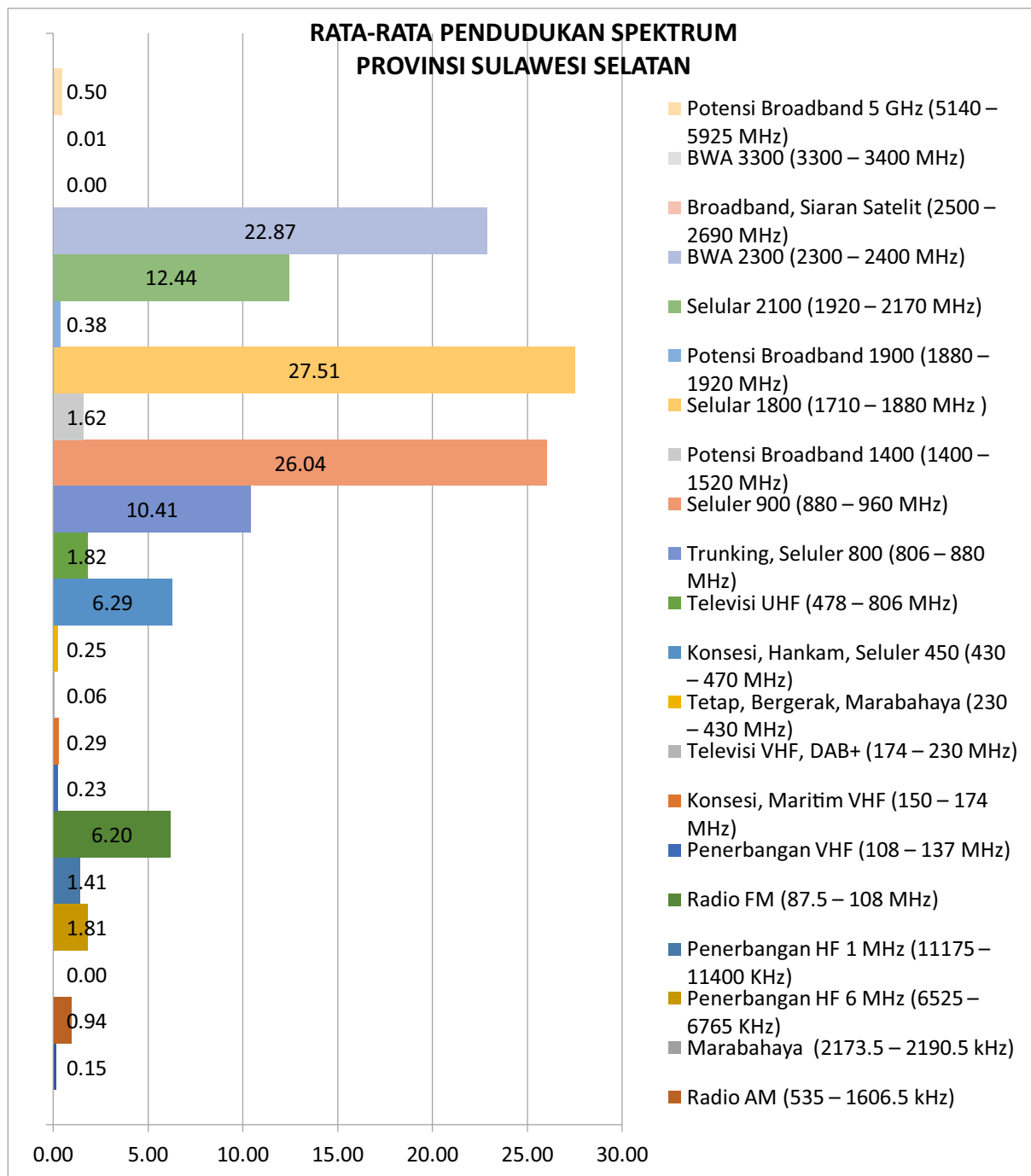
Gambar 3.2. Capaian Observasi dan Monitoring Kab/Kota TA. 2019

Pada tahun 2019, capaian Observasi dan Monitoring untuk indikator Kabupaten/Kota Termonitor dan Okupansi Kabupaten/Kota memiliki nilai capaian yang sama hingga bulan Februari hal ini dapat dilihat pada Gambar 1. Namun pada bulan Maret nilai Capaian Kabupaten/Kota termonitor lebih rendah dibandingkan capaian Okupansi Kabupaten/Kota Termonitor, hal ini disebabkan karena Okupansi oleh perangkat Transportable di 3 (Tiga) kabupaten terekapitulasi dari bulan Maret hingga bulan Juni. Pada bulan Juli, nilai capaian ini telah sama dengan dilakukannya kegiatan Observasi dan Monitoring di ketiga Kabupaten yang terdapat perangkat transportable, yaitu Kabupaten Selayar, Kab. Luwu dan Kab. Luwu Utara. Balai Monitor Makassar telah mencapai target 100 % untuk indikator 80 % Kabupaten/Kota termonitor pada bulan Juli tahun 2019.



Gambar 3.3. Perbandingan Capaian Kab/ Kota Termonitor sejak tahun 2016

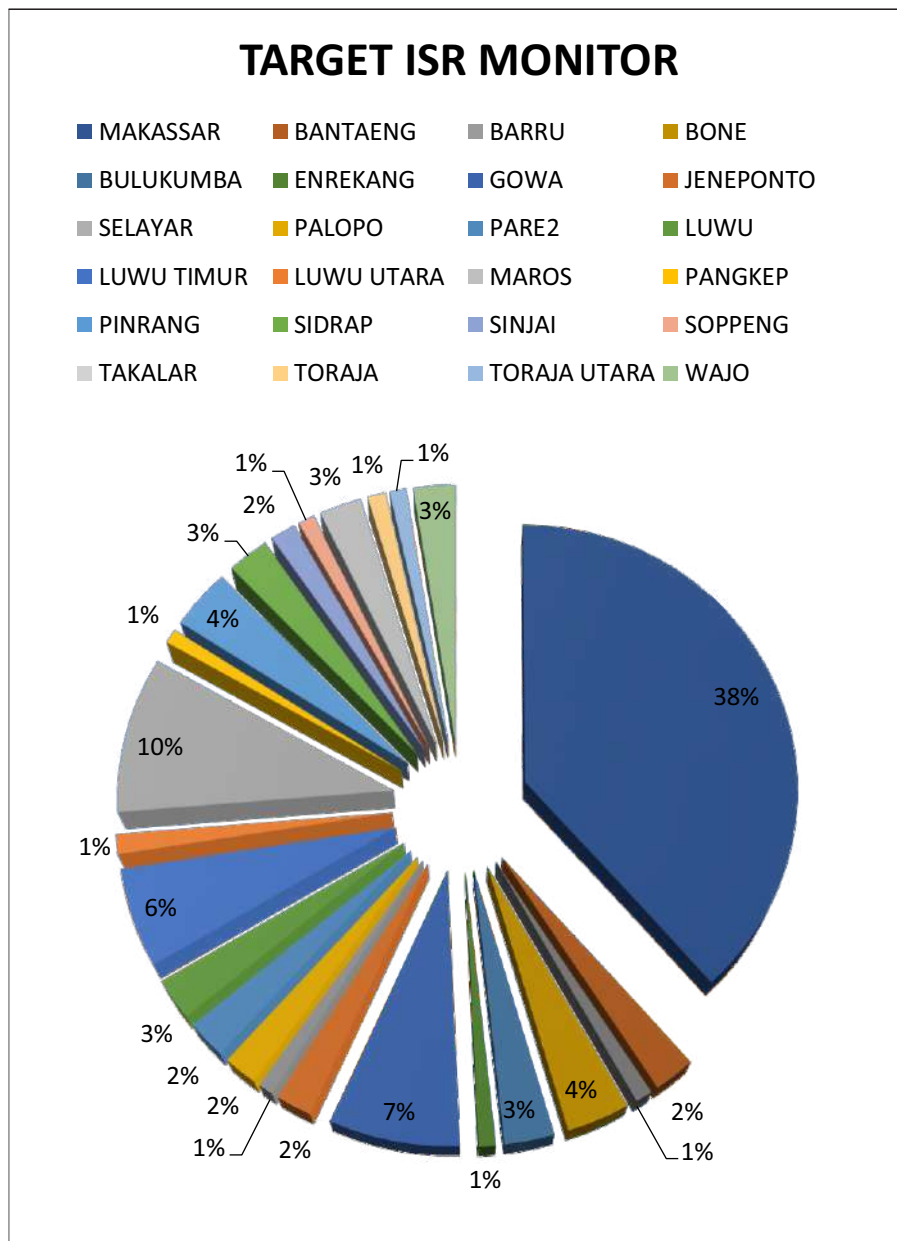
Jika dibandingkan capaian Kab/Kota termonitor sejak tahun 2016, maka capaian tahun 2019 merupakan capaian tertinggi karena melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.4. Rata-rata Pendudukan Spektrum di Provinsi Sulawesi Selatan

Kegiatan Observasi Monitoring dengan menggunakan metode FBO (*Frequency Band Occupancy*) diperoleh nilai rata-rata pendudukan spektrum di Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dilihat pada Gambar 3, dimana pendudukan spektrum tertinggi pada band seluler 1800 MHz, diikuti dengan band seluler 900 MHz, sementara yang terendah adalah band Marabahaya dan Broadband Satelit. Padatnya penggunaan spektrum pada band tersebut

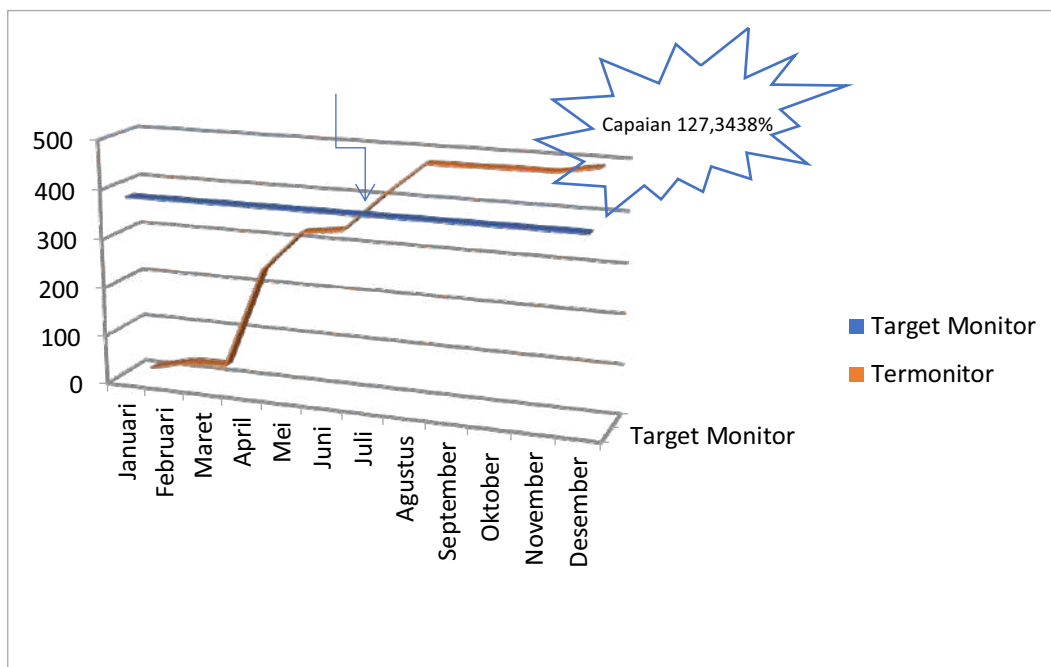
disebabkan oleh besarnya kebutuhan masyarakat akan komunikasi menggunakan telepon bergerak yang terintegrasi dengan data internet yang memiliki kecepatan tinggi.



Gambar 3.5. Target ISR Monitor di Provinsi Sulawesi Selatan

Target 40% ISR termonitor juga merupakan target dari Kegiatan Pemantauan Spektrum Frekuensi Radio dan Standarisasi Perangkat Telekomunikasi, dimana provinsi Sulawesi Selatan memiliki 960 ISR yang menjadi target monitor pada dinas Siaran dan Bergerak Darat. ISR terpadat berada di Kota Makassar sebesar 38.44 % dari jumlah ISR yang harus di monitor. Sementara pengguna ISR terbanyak yang harus di monitor adalah PT. PLN Persero

sebesar 496 ISR diseluruh Provinsi Sulawesi Selatan atau sekitar 51.67% dari jumlah ISR yang harus dimonitor. Berdasarkan data tersebut, maka Balai Monitor Makassar menyusun langkah strategis agar target tersebut dapat tercapai.



Gambar 3.6. Capaian ISR Termonitor

Target ISR Termonitor 40% tercapai oleh Balai Monitor Makassar pada bulan Juli tahun 2020, dimana pada bulan tersebut telah termonitor 406 ISR dari 384 ISR yang harus dimonitor. Dan pada bulan Desember 2020 telah termonitor 489 ISR, sehingga capaian Balmon Makassar pada akhir tahun anggaran sebesar 127.3438% dari target yang telah ditetapkan.

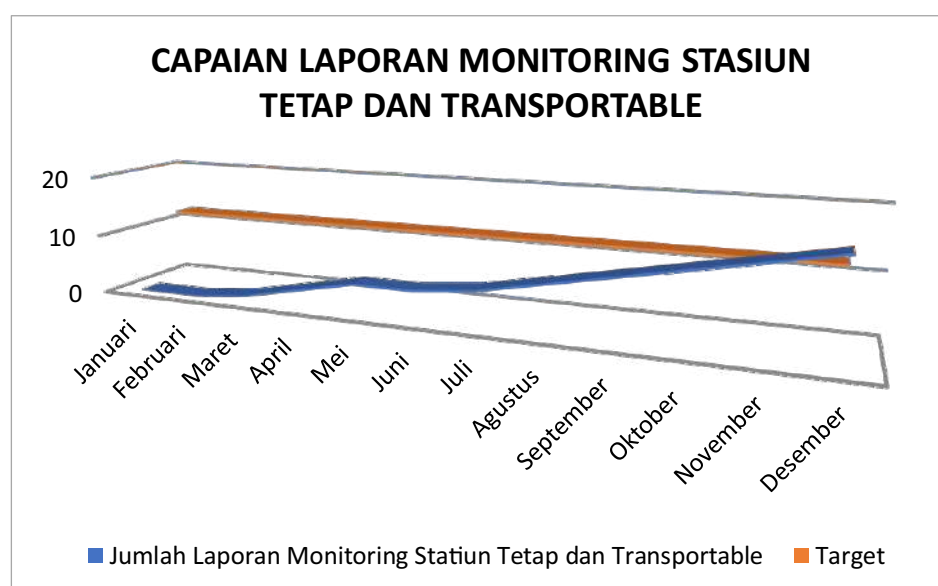
Untuk target hasil monitor yang teridentifikasi, hingga akhir tahun 2019 capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 95.6% dari target sebesar 90%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya hasil monitoring yang tidak dapat teridentifikasi pada kegiatan monitoring di awal tahun. Sementara kegiatan monitoring dengan pengguna frekuensi yang cukup padat telah dilakukan di awal tahun sebelum terbitnya target kinerja tahun 2019.

Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio dari Setiap Stasiun SMFR Tetap dan Transportable

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable	12 Laporan	16 Laporan	116.667

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Indikator Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio dari setiap stasiun SMFR Tetap dan Transportable

Untuk Indikator Kinerja Jumlah Laporan Monitoring Frekuensi Radio dari setiap stasiun SMFR tetap dan transportable dengan target 12 Laporan telah dicapai oleh Balmon Makassar pada bulan Oktober 2020. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 6, dimana laporan yang dikirim merupakan hasil monitoring dari stasiun transportable di 3 (Tiga) Lokasi, yaitu : Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu dan Kab. Selayar. Lambatnya akses internet yang menghubungkan ketiga stasiun tersebut merupakan kendala dalam memperoleh laporan monitoring ini. Selain perangkat Transportable LS Telecom, Balmon Makassar juga mempunyai perangkat TCI namun hingga akhir tahun anggaran tidak dapat melakukan Kegiatan monitoring/Occupancy disebabkan kondisi perangkat tidak mendukung untuk melakukan kegiatan tersebut.



Gambar 3.7. Capaian Monitoring Stasiun Tetap dan Transportable

Jumlah Laporan Berfungsinya Perangkat Monitoring Frekuensi Radio dari Setiap Stasiun SMFR Tetap (Slave) dan Transportable

Laporan berfungsinya perangkat monitoring frekuensi radio dari setiap stasiun SMFR tetap (slave) dan transportable pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar terlaksana setiap bulan selama tahun 2019.

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	Jumlah Laporan Berfungsinya Perangkat Monitoring Frekuensi Radio dari Setiap Stasiun SMFR Tetap (Slave) dan Transportable	12 Laporan	12 Laporan	100%

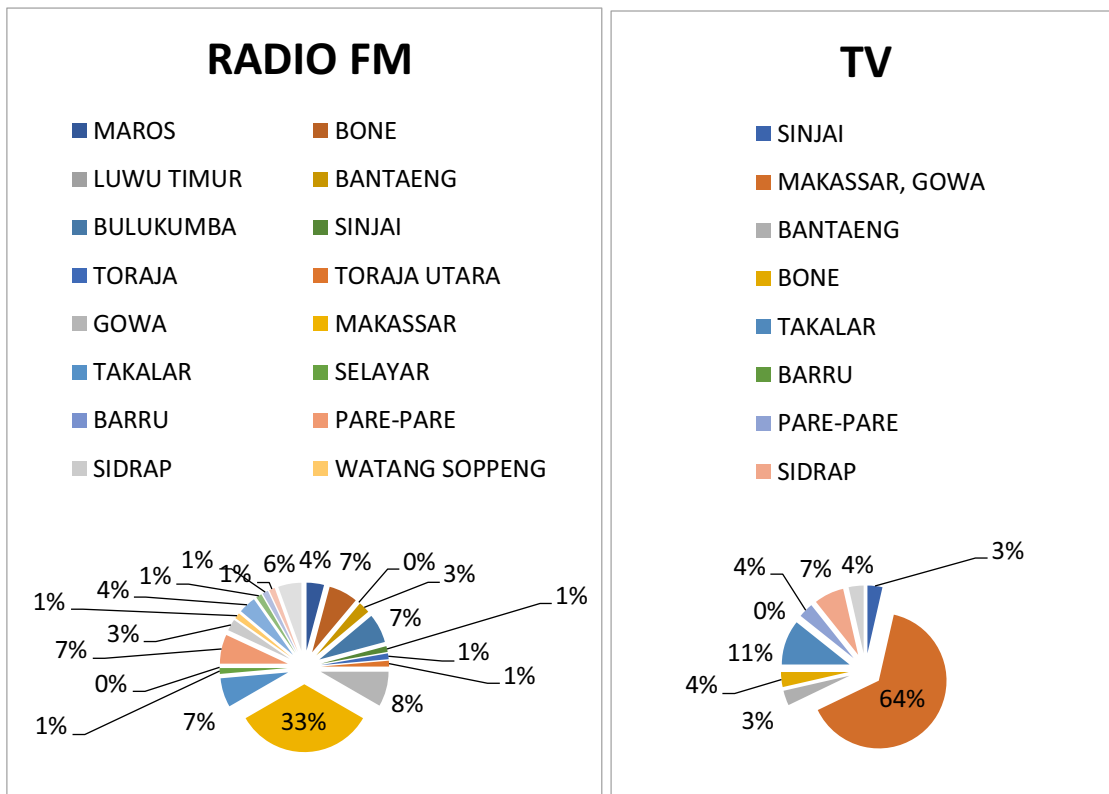
Tabel 3.6. Capaian Kinerja Indikator Jumlah Laporan Berfungsinya Perangkat Monitoring Frekuensi Radio dari Setiap Stasiun SMFR Tetap (Slave) dan Transportable

Persentase Stasiun Radio Penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	Persentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur	35 %	82,65 %	233,76

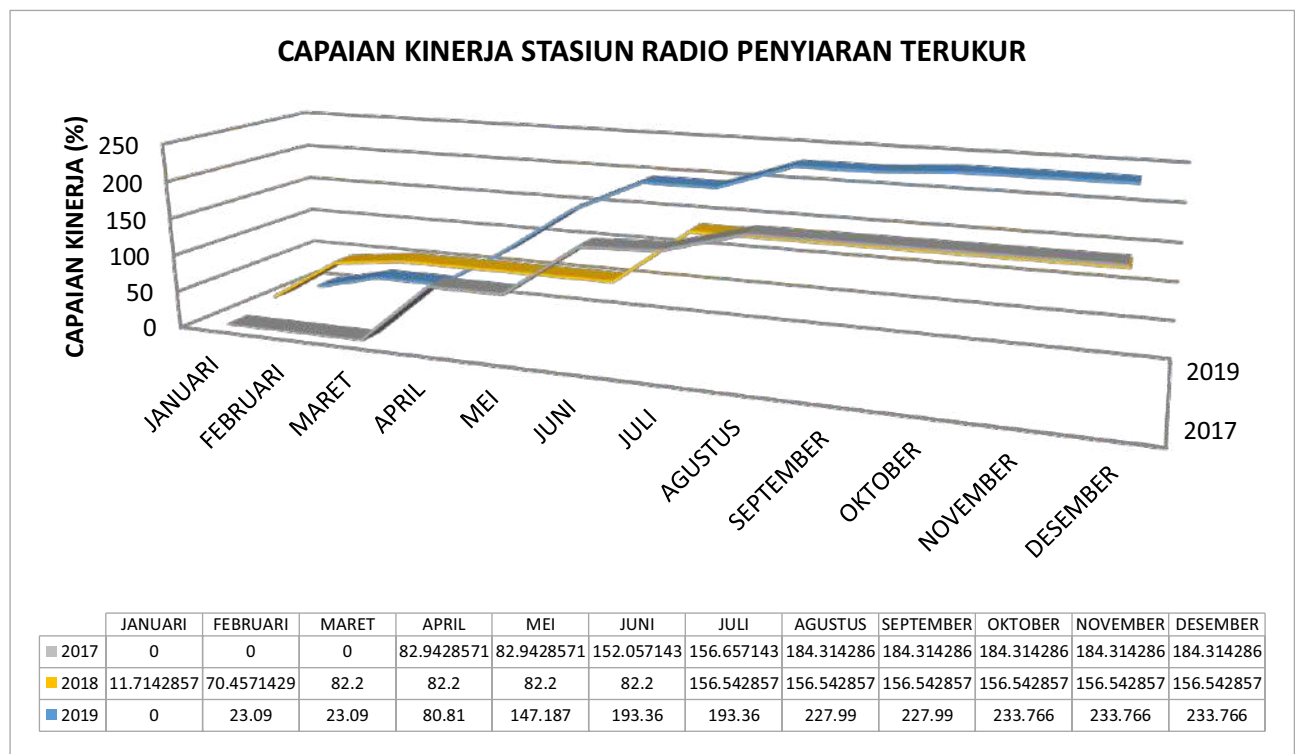
Tabel 3.7. Capaian Kinerja Indikator Persentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang Terukur

Pada layanan Siaran, khususnya sub servis Radio FM dan TV di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki total 98 penyelenggaraan Radio Siaran FM dan TV yang ber ISR. Penyelenggara ber ISR tersebut terdiri dari 70 ISR penyelenggara Radio FM dan 28 ISR penyelenggara TV. Berdasarkan data tersebut, maka target Radio FM dan TV yang harus terukur pada tahun 2019 adalah sebanyak 34 stasiun Radio FM dan TV.



Gambar 3.8. Radio FM dan TV di Provinsi Sulawesi Selatan

Dari Gambar 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah Radio FM dan TV yang ber ISR paling banyak terdapat di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, sehingga untuk mencapai target untuk indikator ini maka pengukuran di kedua daerah ini lebih diutamakan. Selain kedua daerah tersebut, pengukuran dilakukan pula di beberapa kabupaten/kota lainnya sehingga stasiun Radio FM dan TV terukur hingga bulan Desember sebanyak 81 stasiun. Oleh karenanya Capaian Balai Monitor Makassar untuk Indikator Presentase stasiun radio penyiaran (Radio FM dan TV) yang terukur sebesar 233.76% dari target yang telah ditetapkan.



Gambar 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir Indikator Kinerja Stasiun Radio Penyiaran Terukur

Dari Gambar 3.9 terlihat bahwa jika membandingkan Capaian Kinerja 3 Tahun terakhir, maka target stasiun radio penyiaran terukur paling cepat tercapai pada tahun 2019 ini, yaitu pada bulan Mei. Target untuk Indeks Kinerja ini sejak tahun 2017 adalah sama sebesar 35 %, dimana jumlah lembaga penyiaran yang harus diukur kian tahun semakin bertambah. Pada Tahun 2017 Stasiun Radio Siaran di Kota Makassar hanya sebanyak 62 stasiun Radio FM dan TV Siaran, kemudian meningkat menjadi 71 stasiun siaran pada tahun 2018 dan pada Tahun 2019 meningkat sangat signifikan menjadi 98 stasiun siaran.

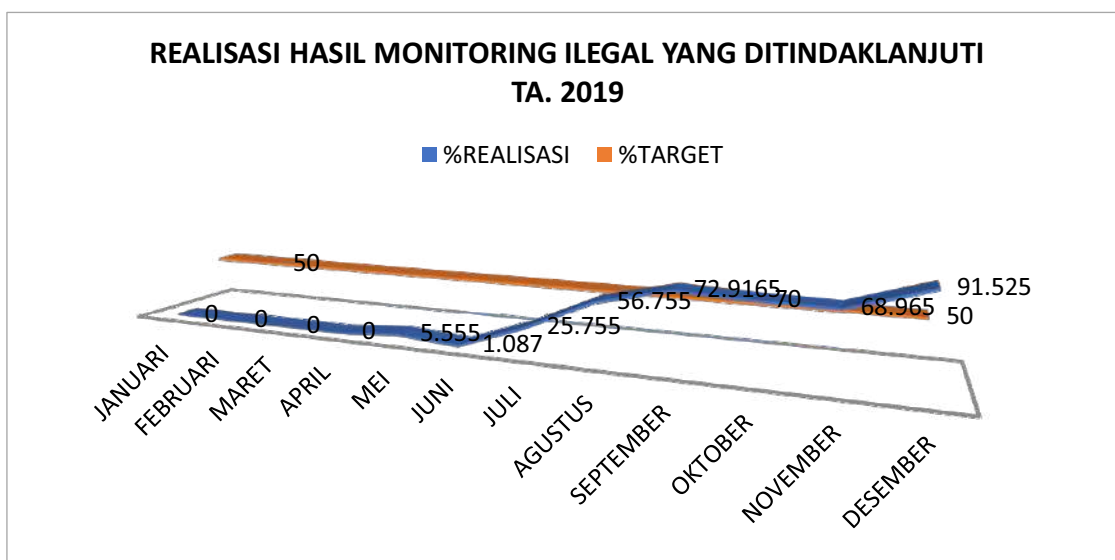
Pengukuran Karakteristik Radio Siaran dan TV Siaran ini bertujuan agar para lembaga penyiaran dalam menyelenggarakan siarannya sesuai dengan aturan, yaitu Permen Kominfo No. 3 Tahun 2017 untuk Radio Siaran FM dan Permen Kominfo No. 31 Tahun 2014 untuk TV Siaran UHF. Apabila hasil ukur menunjukkan adanya pelanggaran, maka Balmon Kelas I Makassar segera memberi peringatan untuk menyesuaikan parameter teknisnya sebagai upaya pencegahan timbulnya gangguan frekuensi radio utamanya frekuensi penerbangan.

Persentase Tindak Lanjut Penggunaan Frekuensi Ilegal

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	Persentase Tindak Lanjut Penggunaan Frekuensi Ilegal	50 %	91,52 %	183,05

Tabel 3.8. Capaian Kinerja Indikator Tindak Lanjut Penggunaan Frekuensi Ilegal

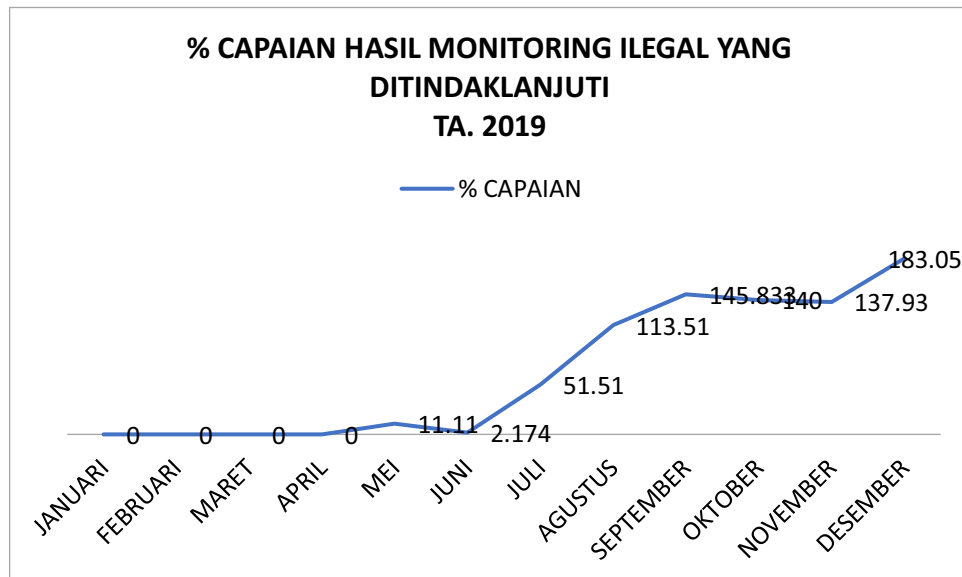
Tindak Lanjut penggunaan Frekuensi Ilegal merupakan tindak lanjut hasil kegiatan Pemantauan Frekuensi Radio dan Standarisasi Perangkat Telekomunikasi yang ditemukan tidak memiliki ISR agar segera memiliki ISR atau meng *off* kan stasiun pemancarnya.



Gambar 3.10. Grafik Realisasi Hasil Monitoring Ilegal yang ditindaklanjuti

Hasil dari tindak lanjut tersebut membutuhkan proses yang diawali dengan Surat Peringatan dari Balmon Makassar kepada pengguna yang belum memiliki ISR hingga terbitnya ISR oleh pengguna frekuensi Radio atau Surat Pernyataan dari pengguna frekuensi radio bahwa mereka telah *Off Air* dilanjutkan dengan pengukuran stasiun radio pemancar. Tindak lanjut lainnya juga berupa penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio. Oleh karena hal tersebut maka realisasi hasil monitoring ilegal yang ditindak lanjuti masih 0% selama 4 (empat) bulan pertama tahun 2019. Realisasi ini meningkat sangat signifikan sejak dilakukan Penertiban Nasional pada bulan November tahun 2019. Hasil akhir pada bulan Desember tahun 2019 diperoleh 46 dari 59 Ilegal sudah *off air*, 3 ber ISR, sementara 3 lainnya masih *On*

Air sehingga realisasi mencapai 91.52% atau dengan kata lain Capaian Hasil Monitoring Ilegal yang ditindaklanjuti mencapai 183.05% dari target 50% yang telah ditetapkan.



Gambar 3.11. Grafik Capaian Hasil Monitoring Ilegal yang ditindaklanjuti

Tujuan dari menindaklanjuti hasil monitoring yang ilegal adalah sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya gangguan frekuensi, utamanya untuk frekuensi penerbangan. Selain dari hasil monitoring yang ilegal yang ditindaklanjuti, hasil kegiatan selain monitoring seperti Inspeksi Stasiun Radio dalam rangka validasi data ISR dan penanganan gangguan juga ditindaklanjuti agar tertib frekuensi dapat tercapai. Hasil kegiatan tersebut digolongkan hasil Mandiri dengan hasil 47 frekuensi hasil Mandiri ditindaklanjuti dari 110 frekuensi yang harus ditindaklanjuti.

Persentase Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring / Ukur di UPT

Indikator kinerja Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring / Ukur di UPT terlaksana sebesar 96.10% dari target sebesar 85% sehingga capaian untuk indikator kinerja ini sebesar 113.06%.

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	Persentase Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring / Ukur di UPT	85 %	96,10 %	113,06

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Indikator Persentase Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring / Ukur di UPT

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar memiliki 165 perangkat pendukung yang kemudian dihapuskan sebanyak 11 perangkat karena kondisi yang sudah rusak berat, sehingga tersisa 154 perangkat pendukung yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio di Provinsi Sulawesi Selatan.

PERIODE	JUMLAH PERANGKAT	KONDISI PERANGKAT		% PERSENTASE
		BAIK	RUSAK	
Januari	165	151	14	91.52
Februari	165	152	13	92.12
Maret	165	152	13	92.12
April	165	152	13	92.12
Mei	154	144	10	93.51
Juni	154	139	15	90.26
Juli	154	141	13	91.56
Agustus	154	143	11	92.86
September	154	145	9	94.16
Oktober	154	140	14	90.91
November	154	140	14	90.91
Desember	154	148	6	96.10

Tabel 3.10. Laporan Service Level Agreement (SLA) Tahun 2019

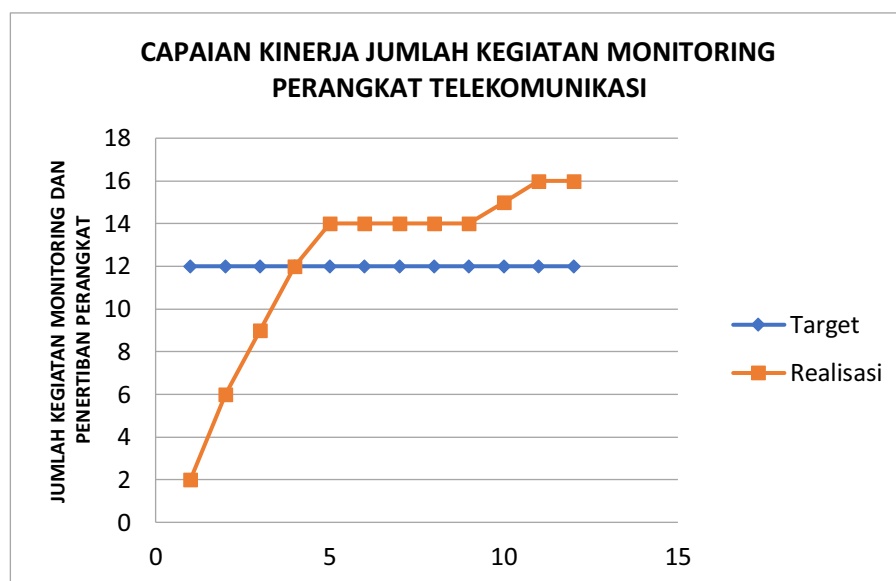
Dari tabel 3.9 terlihat bahwa rata rata kondisi perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT Balai Monitor SFR Kelas I Makassar mencapai angka diatas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa, kondisi perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT Balai Monitor SFR Kelas I Makassar dalam kondisi baik.

Pelaksanaan Monitoring dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	Pelaksanaan Monitoring dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi	12 Laporan	13 Laporan	108,33%

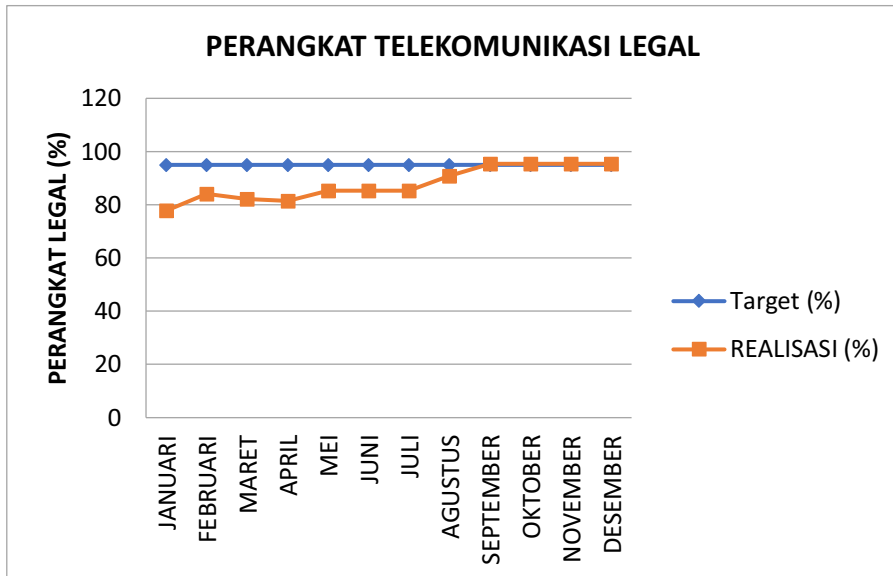
Tabel 3.11. Capaian Kinerja Indikator Pelaksanaan Monitoring dan Penertiban Perangkat

Selain mengawasi penggunaan frekuensi di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Monitor SFR Kelas I Makassar juga melaksanakan pengawasan penggunaan perangkat telekomunikasi. Pengawasan penggunaan perangkat telekomunikasi ini sebagai upaya meminimalisir penggunaan perangkat telekomunikasi yang tidak terstandarisasi, dimana perangkat yang belum terstandarisasi beresiko memiliki parameter teknis yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menimbulkan gangguan frekuensi bagi pengguna frekuensi lainnya.



Gambar 3.12. Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi

Target pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi sebanyak 12 kali dalam tahun 2019 dapat dicapai pada bulan April Tahun 2019. Hingga akhir tahun 2019 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Perangkat Telekomunikasi ini dilaksanakan sebanyak 16 kali. Dari 16 kali pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Penertiban Perangkat di Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh hasil 95.39% perangkat telekomunikasi Legal.



Gambar 3.13. Grafik Perangkat Telekomunikasi Legal yang Termonitor

Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	Persentase (%) pelaksanaan inspeksi sebagai tindak lanjut validasi data ISR	85 %	85,47 %	100,56%

Tabel. 3.12. Capaian Kinerja Indikator Pelaksanaan Inspeksi Sebagai Tindak Lanjut Validasi Data ISR

Kegiatan Inspeksi stasiun Radio merupakan tindak lanjut dari kegiatan Validasi data ISR yang bertujuan meningkatkan kualitas akurasi dan validitas data ISR untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan dan pengelolaan data yang dapat member nilai tambah untuk kepentingan publik. Target dari kegiatan ini adalah 85% ISR hasil inspeksi Valid dari data sampling.

Data yang tidak sesuai ISR ditindaklanjuti agar sesuai ISR dengan cara:

- ISR Baru
- Perubahan data ISR
- Penghentian Masa Laku ISR

Pelaksanaan kegiatan Inspeksi Stasiun Radio Balai Monitor SFR Kelas I Makassar pada Tahun 2019 lebih menitikberatkan pada Operator Seluler. Lambat nya respon dari pengguna frekuensi dalam hal ini Operator Seluler, menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini. Namun setelah kegiatan Penertiban Nasional dilaksanakan, nilai Tindak Lanjut Hasil Inspeksi

yang Tidak Sesuai ISR semakin meningkat. Balai Monitor SFR Kelas I Makassar juga melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Hasil Inspeksi dengan Operator Seluler untuk mengetahui tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Operator Seluler terhadap hasil kegiatan inspeksi ini. Oleh karenanya pada akhir bulan Desember diperoleh capaian nilai 85.47 % data ISR Valid.

Data ISR Pada SIMS	Data Sampling	Hasil Inspeksi			TindakLanjut Hasil Inspeksi Yang TidakSesuai ISR			Capaian (% Valid)
		Stasiun Radio Aktif		Stasiun Radio Tidak Aktif (Off-Air)	Proses ISR	Sudah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	
		Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
18,450	1012	713	103	48	148	152	147	85.47%

Tabel 3.13. Resume Hasil Pelaksanaan Inspeksi Stasiun Radio Tahun 2019

2. Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio

Indikator kinerja pemenuhan pelayanan publik SFR dan perangkat serta penanganan BHP Frekuensi Radio dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkanannya itu sebesar 100%.

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%

Tabel 3.14. Capaian Kinerja Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio

Balai Monitor Spketrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar merencanakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik setiap tahunnya. Unit pelayanan menetapkan persyaratan pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perbandingan capaian indikator kinerja **Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio** selama 5 (tahun) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	2015		2016		2017	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja	2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio	-	-	100%	100%

Tabel 3.15. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio tahun 2015 – 2019

Penilaian capaian kinerja untuk indikator ini baru diterapkan pada tahun 2019. 4 (empat) tahun sebelumnya diterapkan formulasi penilaian capaian kinerja yang berbeda. Indikator kinerja ini dicapai dengan memenuhi beberapa kriteria, antara lain :

1. Persentase penyelesaian aduan/klaim dan konsultasi yang diselesaikan. Tahun 2016 dan 2017, indikator ini merupakan sasaran kinerja utama dengan target 92% dan 93%. Pada tahun 2018, penyelesaian aduan/klaim merupakan salah satu dari 8 (delapan) indikator kinerja dari sasaran kinerja utama dengan target 94%. Tahun 2019, penyelesaian aduan/klaim menjadi salah satu dari 5 (lima) indikator kinerja dari sasaran kinerja utama dengan target 100%.
2. Persentase pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan frekuensi radio yang dilaksanakan oleh UPT. Pada tahun 2016 sampai dengan 2018, pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan frekuensi radio belum menjadi indikator untuk mengukur capaian kinerja UPT. Baru pada tahun 2019, kegiatan ini menjadi salah satu dari 5 (lima) indikator kinerja dari sasaran kinerja utama dengan target 100%.
3. Jumlah laporan pendampingan KPKNL atas Waba yang telah dilimpahkan.
Pada tahun 2016 sampai dengan 2017, kegiatan pendampingan piutang di KPKNL belum menjadi indikator untuk mengukur capaian kinerja UPT. Pada tahun 2018, kegiatan ini

menjadi indikator kinerja dengan target 100%. Pada tahun 2019 kegiatan pendampingan piutang di KPKNL menjadi salah satu dari 5 (lima) indikator kinerja dari sasaran kinerja utama dengan target 100%.

4. Jumlah laporan penanganan Waba untuk pencegahan dan pengurangan waba berpiutang.

Pada tahun 2016 sampai dengan 2018, pelaksanaan kegiatan klarifikasi piutang BHP untuk penanganan waba untuk pencegahan dan pengurangan waba berpiutang belum menjadi indikator untuk mengukur capaian kinerja UPT. Baru pada tahun 2019, kegiatan ini menjadi salah satu dari 5 (lima) indikator kinerja dari sasaran kinerja utama dengan target 100%.

5. Persentase terlaksananya kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR).

Tahun 2016 dan 2017 kegiatan UNAR belum termasuk dalam pengukuran capaian kinerja. Kegiatan UNAR ini baru masuk dalam indikator kinerja pada tahun 2018 dan 2019, dimana pada tahun 2018 UNAR merupakan salah satu dari 8 (delapan) indikator kinerja dari sasaran kinerja utama dengan target 100%. Sama halnya tahun 2019, UNAR menjadi salah satu dari 5 (lima) indikator kinerja dari sasaran kinerja utama dengan target 100%.

Berikut ini penjelasan masing masing kriteria penilaian dari indikator kinerja **“Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat serta Penanganan BHP Frekuensi Radio”**.

Persentase Penyelesaian Aduan/Klaim dan Konsultasi yang Diselesaikan

Penggunaan frekuensi radio yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi yang terus berkembang mengakibatkan permasalahan dalam penggunaan frekuensi radio sangat beragam dan cenderung semakin meningkat. Peningkatan penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut seharusnya diikuti dengan kesadaran untuk melakukan pengurusan izin, menggunakan frekuensi radio secara tertib, aman, tidak saling mengganggu, dan sesuai ketentuan teknis, serta menggunakan perangkat yang telah disertifikasi/distandarisasi oleh Ditjen SDPPI Kemkominfo. Dampak dari ketidaksadaran dan penyalahgunaan pemakaian frekuensi radio tersebut, seringkali menimbulkan gangguan frekuensi radio antar pengguna frekuensi radio. Untuk itu, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar yang mempunyai tugas dan fungsi (tusi) sebagai pengawas dan pengendali terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio serta senantiasa harus siap sedia dalam hal melakukan

penanganan gangguan frekuensi radio terhadap pengguna frekuensi radio yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) khususnya yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Penanganan gangguan dimaksudkan untuk menemukenali dan mendeteksistasiun radio dan pengguna frekuensi radio yang mengganggu dan menginterferensi pancaran frekuensi radio dan untuk mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang teratur, tertib, efektif, efisien, dan optimal, melakukan aktifitas pancaran frekuensi radio setelah memiliki ISR, menggunakan frekuensi radio sesuai dengan izin yang diberikan dan sesuai dengan peruntukannya serta bebas dari potensi interferensi dan saling mengganggu.

Persentase (%) penyelesaian aduan/klaim dan konsultasi yang diselesaikan sepanjang Tahun 2019 adalah sebesar 100 % dari target 100%.

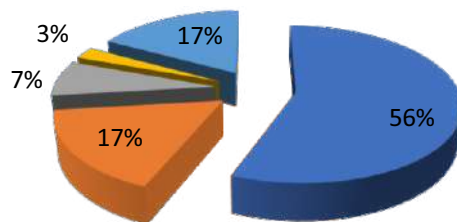
KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio	Persentase (%) Penyelesaian Aduan/klaim dan konsultasi yang diadakan	95 %	100 %	105,26%

Tabel 3.16. Capaian Kinerja Indikator Persentase (%) Penyelesaian Aduan/Klaim dan Konsultasi yang Diselesaikan Sepanjang Tahun 2019

Penanganan gangguan frekuensi merupakan hak dari para pengguna frekuensi yang memiliki ISR apabila frekuensi yang digunakannya sesuai ISR terganggu. Penanganan gangguan di Provinsi Sulawesi Selatan selama TA. 2019 sebanyak 41 kasus gangguan, dimana persentase gangguan terbanyak pada Layanan Bergerak Darat, sebanyak 56 % (23 kasus) dan paling sedikit adalah pada Layanan Siaran sebanyak 3 % (1 kasus). Layanan Penerbangan sebagai Layanan prioritas pada kasus penanganan gangguan menempati urutan kedua terbanyak, yaitu 17 % (7 kasus). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.14.

KASUS GANGGUAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TA. 2019

■ BERGERAK DARAT ■ PENERBANGAN ■ SATELIT ■ SIARAN ■ TETAP



Gambar 3.14. Kasus Gangguan di Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2019

Usaha-usaha preventif dalam pencegahan gangguan frekuensi juga dilakukan selain kegiatan-kegiatan yang bersifat tupoksi dari Balai Monitor SFR Kelas I Makassar, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukan agar masyarakat paham akan pentingnya penggunaan frekuensi yang tertib.

Capaian Kinerja untuk Indikator Penyelesaian Aduan/klaim dan konsultasi yang diadakan hingga akhir TA. 2019 adalah sebesar 105,26 % dari Target sebesar 95% yang telah ditetapkan. Hal inimenunjukkan bahwa 100% aduan/klaim gangguan dapat diatasi hingga Clear.

Perhitungan persentase Capaian dan Realisasi Tahun 2016 dan Tahun 2017 berbeda dengan Tahun 2018. Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 dipersentasekan setiap bulannya, sedangkan untuk Tahun 2018 perhitungan persentase diakumulasi sampai bulan Desember demikian pula pada Tahun 2019. Target aduan/klaim yang diselesaikan setiap tahun berbeda, sehingga yang dapat dibandingkan pertahunnya hanya realisasi jumlah aduan/klaim yang diselesaikan.

Berikut data penyelesaian aduan/klaim dan konsultasi yang diselesaikan selama 5 (lima) tahun terakhir :

TahunAnggaran	Keterangan
2015	84.61% dari target 90%. 13 aduan, terselesaikan 11 aduan.
2016	100% dari target 92%. 14 aduan, terselesaikan 14 aduan.
2017	100% dari target 93%.
2018	100% dari target 94%
2019	100%. Selama kurun waktu tahun 2019, terselesaikan 21 aduan/klaim.

Tabel 3.17Capaian Kinerja Penanganan Gangguan Tahun 2015 – 2019

Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang Dilaksanakan oleh UPT

Pada tahun 2019, indikator pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan frekuensi radio yang dilaksanakan oleh UPT memiliki target sebesar 100%. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai perpanjangan Ditjen SDPPI yang bertugas mengawasi penggunaan spektrum frekuensi radio, maka Balai Monitor SFR Kelas I Makassar mengadakan kegiatan Sosialisasi Penggunaan Frekuensi Radio yang ditargetkan terlaksana sebanyak 2 (dua) kali selama tahun anggaran 2019. Balai Monitor SFR Kelas I Makassar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penggunaan Frekuensi Radio sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Kota Makassar dan di Kabupaten Sinjai. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini tercapai sesuai target yang telah ditetapkan itu sebesar 100%.

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio	Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang Dilaksanakan oleh UPT	100 %	100 %	100%

Tabel 3.18. Capaian Kinerja Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perizinan Frekuensi Radio yang Dilaksanakan oleh UPT

Jumlah Laporan Pendampingan KPKNL atas Waba yang Telah Dilimpahkan

Pelimpahan piutang kepada KPKNL memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penagihan kepada wajib bayar yang akan meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya Hak Pengguna (BHP) merupakan salah satu sumber PNBP yang sangat potensial di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah ditunjuk untuk menjadi mitra kerja KPKNL Makassar, KPKNL Palopo dan KPKNL Pare-Pare untuk dapat menjalin koordinasi dan komunikasi yang lebih intens untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelimpahan piutang negara yang bersumber dari PNBP BHP Frekuensi Radio.

Selama tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menyelenggarakan 3 (tiga) kegiatan Pendampingan Piutang di KPKNL, yaitu :

1. Kegiatan Pendampingan Piutang di KPKNL Kota Palopo dan Kota Pare-Pare;
2. Kegiatan Pendampingan Piutang di Kota Makassar; dan
3. Kegiatan Pendampingan Piutang di Kota Makassar dan Kota Pare-Pare.

Laporan pendampingan piutang ini dikirim setiap triwulan selama tahun 2019.

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio	Jumlah Laporan Pendampingan KPKNL atas Waba yang Telah Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100%

Tabel 3.19. Capaian Kinerja Indikator Jumlah Laporan Pendampingan KPKNL atas Waba yang Telah Dilimpahkan

Jumlah Laporan Penanganan Waba Untuk Pencegahan dan Pengurangan Waba Berpiutang

Indikator jumlah laporan penanganan waba untuk pencegahan dan pengurangan waba berpiutang dilakukan melalui kegiatan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna (SPP BHP) yang dikirim secara berkala kepada wajib bayar yang bersangkutan. Target indikator ini sebesar 100%.

Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah menerbitkan 235 SPP dan 40 ST dan telah didistribusikan kepada wajib bayar yang bersangkutan.

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio	Jumlah Laporan Penanganan Waba Untuk Pencegahan dan Pengurangan Waba Berpiutang	12 Laporan	12 Laporan	100%

Tabel 3.20. Capaian Kinerja Jumlah Laporan Penanganan Waba Untuk Pencegahan dan Pengurangan Waba Berpiutang

Persentase Terlaksananya Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)

Untuk mendukung tercapainya suatu tujuan kegiatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang tertib dan teratur di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar, dibutuhkan pelaksanaan UNAR (Ujian Negara Amatir Radio) menjadi sarana pendukung di Lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar.

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Pemenuhan Pelayanan Publik SFR dan Perangkat Serta Penanganan BHP Frekuensi Radio	Persentase (%) Terlaksananya Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)	100%	100%	100%

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Persentase (%) Terlaksananya Kegiatan UNAR

Kegiatan pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio merupakan kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas monitoring, observasi, pengukuran, penanganan gangguan interferensi frekuensi radio dan validasi data pengguna frekuensi radio serta tugas tugas operasional rutin lainnya yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar. Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) secara e-licensing akan meningkatkan kualitas sehingga pencapaian kinerja fungsi pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tahun 2019 mencapai target yang telah ditentukannya itu 100%. Pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar ditargetkan terlaksana sebanyak 2 kali selama tahun 2019 yaitu di Kabupaten Soppeng pada tanggal 03 s.d. 05 Agustus 2019 dan di Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 05 s.d. 08 September 2019.

Kabupaten Soppeng			
Kategori	Jumlah Peserta	Lulus	Tidak Lulus
Tingkat Siaga (YD)	256	252	4
Tingkat Penggalang (YC)	28	28	-
Tingkat Penegak (YB)	-	-	-

Tabel.3.22 Data Peserta Pelaksanaan UNAR di Kabupaten Soppeng

Kabupaten Luwu Timur			
Kategori	Jumlah Peserta	Lulus	Tidak Lulus
Tingkat Siaga (YD)	134	127	7
Tingkat Penggalang (YC)	31	26	5
Tingkat Penegak (YB)	5	3	2

Tabel 3.23 Data Peserta Pelaksanaan UNAR di Kabupaten Luwu Timur

Sasaran 2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang Bersih, Efisien, dan Efektif

1. Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan

Indikator kinerja layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan ditargetkan sebesar 100%.

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang Bersih, Efisien dan Efektif	Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	100%	100%	100%

Tabel 3.24. Capaian Kinerja Indikator Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan

Perbandingan capaian indikator kinerja **Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan** selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	2015		2016		2017	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja	2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.25. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan



Pada tahun 2015, 2016, dan 2017, penerapan indikator kinerja persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan belum diterapkan. Pada tahun 2015, penetapan kinerja hanya terfokus pada persentase (%) kabupaten/kota termonitor dan persentase (%) penanganan aduan/klaim gangguan pengguna spektrum frekuensi radio. Pada tahun 2016 adalah capaian kinerja layanan dukungan teknis dengan target 100%, sementara tahun 2017 capaian kinerja hanya

mencakup persentase (%) kabupaten/kota termonitor, persentase (%) dinas siaran yang terukur dan persentase (%) aduan yang ditangani. Penerapan capaian kinerja dengan indikator Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan baru diterapkan pada tahun 2018, namun pada tahun 2019, indikator ini diukur menggunakan formula yang berbeda dengan tahun 2018. Pada tahun 2019, indikator ini diukur melalui beberapa kriteria penilaian, antara lain jumlah dokumen perencanaan program kerja dan anggaran dan pelaporan kinerja sesuai aturan yang berlaku, jumlah dokumen pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku, jumlah dokumen penatausahaan kepegawaian UPT dan jumlah dokumen keuangan UPT.

Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Anggaran dan Pelaporan Kinerja

Pada tahun 2019, seluruh kegiatan yang telah direncanakan telah berjalan sesuai dengan rencana yang disusun. Selama tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar telah melakukan 6 (enam) kali revisi DIPA, dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi DJA sebanyak 1 (satu) kali berupa revisi pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- pada belanja gaji dan belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran pada bulan Oktober untuk memenuhi kebutuhan belanja gaji pada UPT lain.
2. Revisi Kanwil sebanyak 3 (tiga) kali revisi administrasi perubahan pejabat perbendaharaanya itu perubahan nama bendahara dan penambahan target kegiatan, revisi perubahan rencana penarikan berupa penyesuaian halaman III DIPA untuk triwulan I, II, III dan IV.
3. Revisi kewenangan KPA yaitu perubahan detail pada belanja pemeliharaan dan pergeseran antar akun dan antar detil akun dalam satu output kegiatan.

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Anggaran dan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%

Tabel 3.26. Capaian Kinerja Indikator Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Anggaran dan Pelaporan Kinerja

Pelaksanaan atau penyerapan anggaran dilaksanakan melalui kegiatan yang telah direncanakan, antara lain :

1. Pelaporan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan setiap bulan melalui aplikasi SMART DJA, e-monev Bappenas, matriks rocan dan pengisian capaian Perjanjian Kinerja melalui aplikasi SIPINTER.
2. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran selama tahun anggaran 2019 berupa LPJ Bendahara dan pelaporan konfirmasi afirmasi pajak yang disetor melalui KPPN paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Jumlah Dokumen Keuangan UPT

Pagu anggaran pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebesar Rp. 14.336.578.000,- kemudian berkurang sebesar Rp. 300.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan pagu minus UPT lain sehingga pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menjadi sebesar Rp. 14.036.578.000,-

Balai Monitor SFR Kelas I Makassar secara rutin menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Laporan Konfirmasi Afirmasi Pajak, dan Rekonsiliasi SAIBA ke KPPN Makassar I sebelum tanggal 10 setiap bulan berikutnya.

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	Jumlah Dokumen Keuangan UPT	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Tabel 3.27. Capaian Kinerja Indikator Jumlah Laporan Dokumen Keuangan UPT

Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN

Neraca menggambarkan informasi mengenai posisi laporan keuangan suatu entitas yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas pada periode tahun berjalan. Neraca Balai Monitor

Spektrum Frekuensi Radio Makassar posisi 31 Desember 2019 secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah total aset Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Makassar sebesar Rp. 36.879.898.184,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Aset Lancar sebesar Rp. 715.185,- yang terdiri dari Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) sebesar Rp. 333.785,- dan Persediaan sebesar Rp. 381.400,-
 - b. Aset Tetap yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan yang tercatat dalam BMN melalui aplikasi SIMAK-BMN sebesar Rp. 36.359.305.302,-
 - c. Aset Lainnya sebesar Rp. 68.210.697,- yang terdiri dari Aset Tak Berwujud sebesar Rp. 1.736.299.870,-, Aset Lain-Lain sebesar Rp. 577.988.000,- dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebesar Rp. -2.246.077.173,-.
2. Kewajiban sebesar Rp. 622.515.159,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 622.515.159,-.
3. Ekuitas sebesar Rp. 35.805.716.025,-

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Tabel 3.28. Capaian Kinerja Indikator Jumlah Dokumen Pengelolaan BMN

Jumlah Dokumen Penatausahaan Kepegawaian

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Tabel 3.29. Capaian Kinerja Indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan Kepegawaian

Tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar memiliki 35 pegawai negeri sipil dan 21 pegawai non PNS yang terdiri dari 7 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 14 tenaga outsourcing, yang terdiri dari 5 orang petugas kebersihan, 2 orang sopir dan 7 orang tenaga keamanan. Perbandingan jumlah pegawai

pada 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

	2015	2016	2017	2018	2019
Pegawai Negeri Sipil	37	37	36	34	35
PPNPN	7	7	7	7	7
Tenaga Kebersihan	5	5	6	6	5
Sopir	3	3	2	2	2
Tenaga Keamanan	6	6	8	8	7

Tabel. 3.30Jumlah PNS, PPNPN, dan Tenaga Outsourcing Tahun 2015-2019

Pada tahun 2019, jumlah pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Makassar bertambah yang disebabkan adanya mutasi pegawai, pegawai yang pensiun dan pensiun dini serta adanya pegawai yang mengundurkan diri.

Berikut tabel mutasi pegawai, pegawai yang pensiun dan pensiun dini serta pegawai yang mengundurkan diri :

Nama / NIP	Bagian		TMT	SPPT		Keterangan
	Lama	Baru		Nomor	Tanggal	
Irwan Asis Rekeng 198004122006041004	Balai Monitor SFR Kelas II Manado	Balai Monitor SFR Kelas I Makassar	1 Januari 2019	25/KP.04.01 tahun 2018	12 Desember 2018	Mutasi
Helmy Zainuddin 197912082008021001	Balai Monitor SFR Kelas I Makassar	Balai Monitor SFR Kelas II Merauke	14 Juni 2019	613 Tahun 2019	16 Juli 2019	Mutasi
Muhammad Takdir 196907311990031001	Balai Monitor SFR Kelas I Makassar	Balai Monitor SFR Kelas I Semarang	14 Juni 2019	613 Tahun 2019	16 Juli 2019	Mutasi
Yudi Purnomo 196506271985031003	Balai Monitor SFR Kelas I Semarang	Balai Monitor SFR Kelas I Makassar	14 Juni 2019	613 Tahun 2019	16 Juli 2019	Mutasi
Padang SukmonoAdji 197101032003121003	Balai Monitor SFR Kelas I Makassar	Balai Monitor SFR Kelas I Semarang	1 Oktober 2019	34/KP.04.01 tahun 2019	6 September 2019	Mutasi
Alfiyah Dini 198107172008032001	Balai Monitor SFR Kelas I Makassar	-	30 Juni 2019	12/KP.08.01 tahun 2019	17 Juni 2019	MengundurkanDiri
Ariyanti 198005312003122001	Balai Monitor SFR Kelas I Makassar	-	1 Juli 2019	01051/12023/00 /12/2019	3 Desember 2019	Pensiun Dini
Hidayat	Balai	-	1 Agustus		20 Mei	Pensiun

196107121989031007	Monitor SFR Kelas I Makassar		2019		2019	
Wasding 19611101989031003	Balai Monitor SFR Kelas I Makassar	-	1 Desember 2019	00481/12023/AZ/06/19	12 Juni 2019	Pensiun
ManguPurwoko 196111191986031006	Balai Monitor SFR Kelas I Makassar	-	1 Desember 2019	00480/12023/AZ/06/19	12 Juni 2019	Pensiun

Tabel 3.31. Daftar Pegawai Mutasi dan Pensiun Tahun 2019

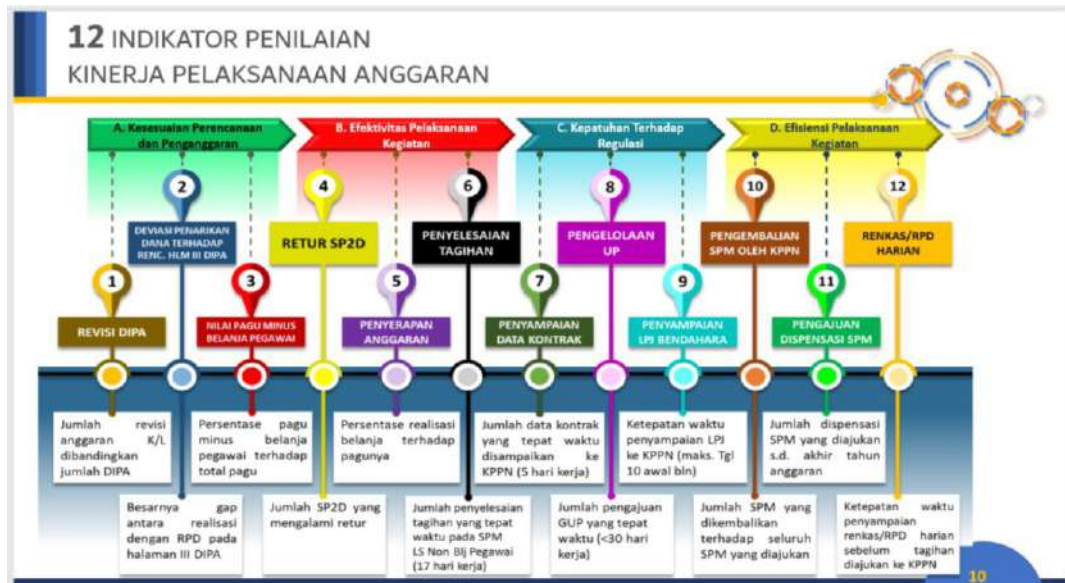
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Score merupakan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang Bersih, Efisien dan Efektif	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Score	94% (dariskala 100)	95,17%	101.24%

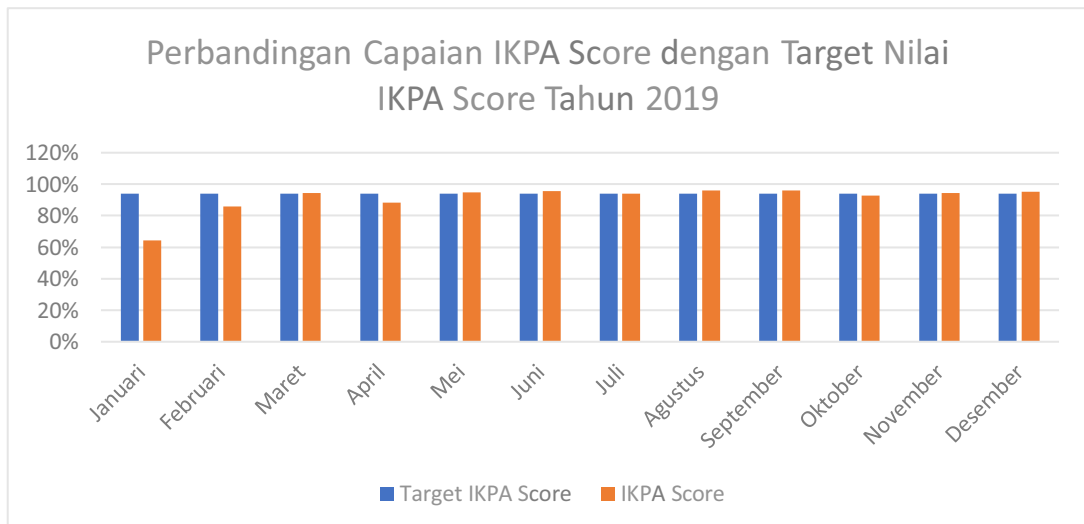
Tabel 3.32 Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Score Tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar mencapai nilai IKPA akhir sebesar 95,15% atau melebihi target yang telah ditetapkannya itu sebesar 94%. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Monitor SFR Kelas I Makassar telah melaksanakan pengelolaan anggaran pada tahun 2019 dengan cukup baik, baik dari sisi perencanaan anggaran maupun efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dibawah ini merupakan indikator-indikator penilaian kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan :



Gambar 3.15. Indikator Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019

Berikut perbandingan capaian IKPA Score yang dicapai oleh Balai Monitor SFR Kelas I Makassar selama tahun anggaran 2019 dengan target nilai IKPA yang telah ditetapkan oleh Ditjen SDPPI :



Gambar 3.16. Capaian IKPA Score Tahun 2019

Perbandingan capaian indikator kinerja **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)** selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	2015		2016		2017	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja	2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)	-	-	94% (dari skala 100)	95,17%

Tabel 3.33. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator IKPA Score Tahun 2015-2019

Indikator capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score) baru diterapkan pada tahun 2019 dengan target capaian sebesar 94% (dari skala 100). Penilaian IKPA Score ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, baik dari sisi perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kualitas laporan keuangan.

B. Kinerja Lainnya

1. Car Free Day

Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Tertib Penggunaan Frekuensi Radio pada kegiatan *Car Free Day* Losari dan Sudirman. Kegiatan ini diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan yaitu pada tanggal 14 Juli 2019, 24 November 2019 dan 1 Desember 2019 yang dihadiri oleh seluruh pegawai baik PNS maupun Non PNS.

Kegiatan ini diselenggarakan agar masyarakat Kota Makassar menyadari pentingnya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang baik dan benar dan sesuai peruntukan serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi dan penjelasan agar masyarakat lebih bijak dalam memanfaatkan penggunaan spektrum frekuensi radio secara efektif dan efisien, menggunakan perangkat yang telah tersertifikasi.

2. *Innovations of Frequency and Standardization Festival (IFaS-Fest)*

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan IFaS-Fest tahun 2019. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menjadi pemenang dalam SDPPI Choice Award kategori UPT Dengan Monitoring dan Penertiban Terbaik dan juara III SDPPI Creator kategori Best Video Story oleh Nur Aswin Syah (link video profile <https://www.youtube.com/watch?v=KPu-ME4XaFs>) yang dilaksanakan pada tanggal 2 - 4 Oktober 2019 di Hotel Pullman Ciawi, Kabupaten Bogor.

3. *Pembukaan Maritime On The Spot (MOTS)*

Ditjen SDPPI menyelenggarakan program kerja Maritime On The Spot (MOTS) yang merupakan solusi bagi nelayan dalam mengurus Izin Stasiun Radio (ISR) dan sertifikasi perangkat telekomunikasi. Program kerja ini dilakukan dengan cara membuka loket pelayanan di pelabuhan-pelabuhan yang telah ditunjuk sebelumnya. Tujuan pelaksanaan program kerja ini adalah untuk mengurangi gangguan frekuensi penerbangan dan meningkatkan keselamatan pelayaran rakyat, serta meningkatkan penggunaan alat dan perangkat maritim yang bersertifikasi.

Pada tahun 2019, Ditjen SDPPI melaksanakan uji coba kegiatan ini pada 8 (delapan) UPT yang secara serentak dibuka pada tanggal 2 September 2019, salah satunya Balai Monitor SFR Kelas I Makassar yang berlokasi di Pelabuhan Untia.

4. *Pembukaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) Berbasis Computer Assisted Testing (CAT)*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana dalam Peraturan Pemerintahan tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan ujian amatir radio yang sebelumnya merupakan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dialihkan menjadi urusan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, efisien, transparan dan akuntabel, pada tahun 2019 Ditjen SDPPI dalam hal ini Direktorat Operasi Sumber Daya bersama seluruh UPT melakukan transformasi pelaksanaan UNAR yang semula dilakukan secara tertulis kini dilakukan secara komputerisasi (*computer assisted testing*) atau yang biasa kita kenal dengan CAT.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menyelenggarakan ujian amatir radio berbasis CAT pada tahun 2019, pembukaannya dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2019 di hotel Claro Makassar, yang dibuka oleh Direktur Operasi Sumber Daya, Dwi Handoko.

C. Realisasi Anggaran

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar mengelola anggaran untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 14.336.578.000, yang kemudian berkurang sebesar Rp. 300.000.000, untuk memenuhi kebutuhan pagu minus UPT lain sehingga pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menjadi sebesar Rp. 14.036.578.000, yang



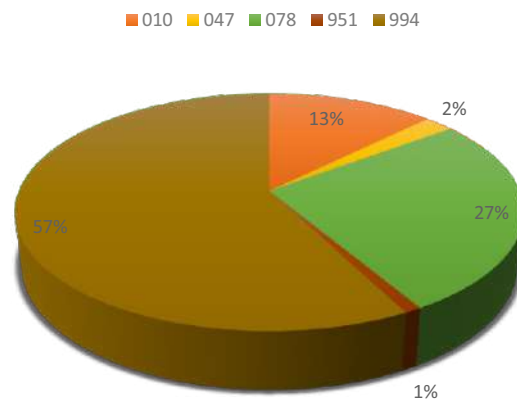
anggarannya bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 6.313.404.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 7.723.174.000,- yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Nomor : SP DIPA -059.03.2.613434/2019

tanggal 5 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Ouput	Uraian	Pagu	Target Kegiatan
1.	3053.010	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber daya Pos dan Informatika Balmon Kelas I Makassar	Rp 1.768.360.000	86 Kegiatan
2.	3053.047	Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Makassar	Rp 305.200.000	18 Kegiatan
3.	3053.078	Dukungan Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio UPT Ditjen SDPPI	Rp 3.750.268.000	1 Layanan
4.	3053.951	Layanan Internal (Overhead)	Rp 131.500.000	1 Layanan
5.	3053.994	Layanan Perkantoran	Rp 8.081.250.000	1 Layanan
TOTAL			Rp	14.036.578.000

Tabel 3.34. Pagu Anggaran Per Komponen Kegiatan Tahun 2019

Komposisi Pagu Anggaran

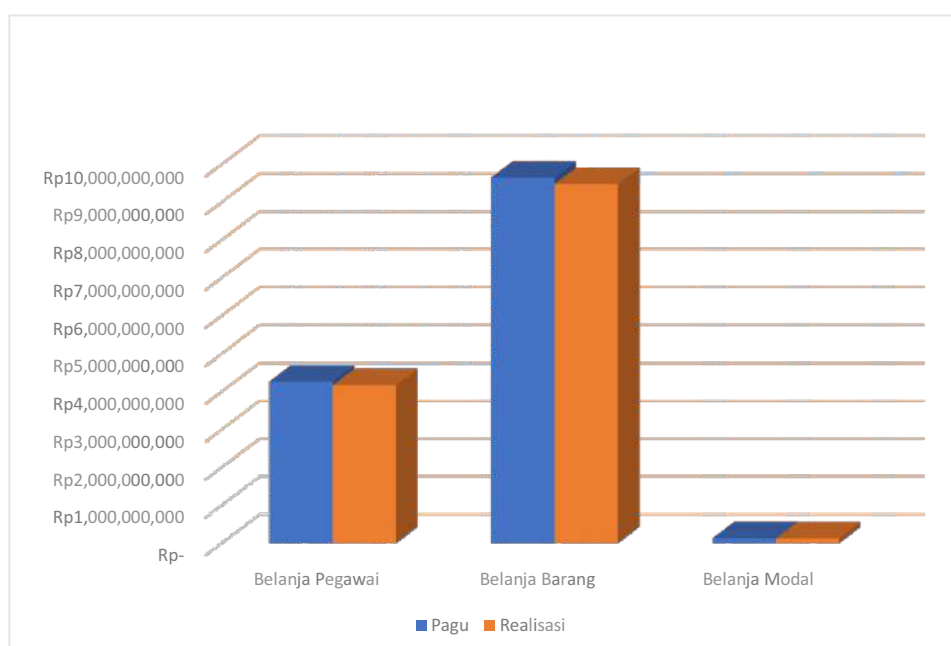


Gambar 3.17. Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2019

Realisasi anggaran per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 13.771.088.033, atau sebesar 98,11% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 14.036.578.000,-.

Uraian	2019		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	Rp 4.260.494.000	Rp 4.166.721.119	97,80%
Belanja Barang	Rp 9.644.584.000	Rp 9.475.163.144	98,24%
Belanja Modal	Rp 131.500.000	Rp 129.202.963	98,25%
Total	Rp 14.036.578.000	Rp 13.771.088.033	98,11%

Tabel. 3.35 Realisasi Anggaran tahun 2019 Per Jenis Belanja



Gambar 3.18. Grafik Jumlah Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2019

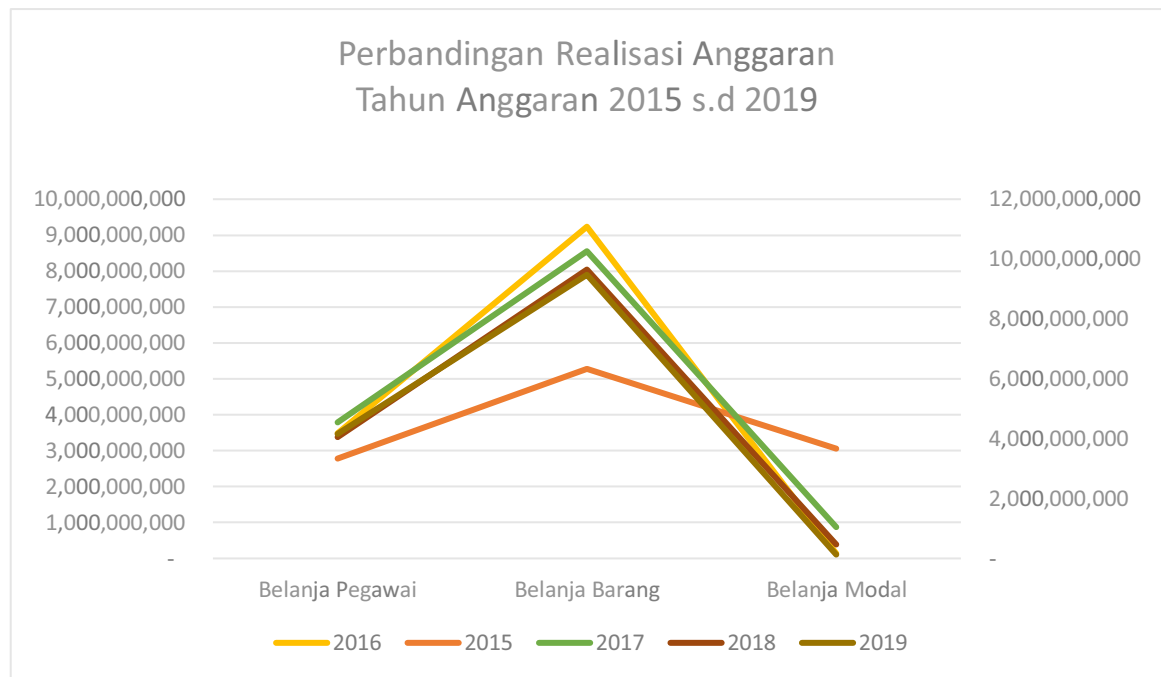
Berikut perbandingan realisasi anggaran tahun 2016 sampai dengan 2019 :

Uraian	2015	%	2016	%
	Realisasi		Realisasi	
Belanja Pegawai	Rp 3,335,991,110	96.64%	Rp 3,484,013,321	95.33%
Belanja Barang	Rp 6,332,327,130	67.46%	Rp 9,234,335,111	73.26%
Belanja Modal	Rp 3,669,652,990	98.81%	Rp 137,470,286	98.19%
Total	Rp 13,337,971,230	80.58%	Rp 12,855,818,718	78.39%

Uraian	2017		%	2018		%
	Realisasi			Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp	4,539,525,695	99.31%	Rp	4,049,125,119	98.39%
Belanja Barang	Rp	10,262,628,137	96.70%	Rp	9,648,960,691	97.79%
Belanja Modal	Rp	1,046,223,687	95.37%	Rp	466,312,975	99.47%
Total	Rp	15,848,377,519	97.35%	Rp	14,164,398,785	98.01%

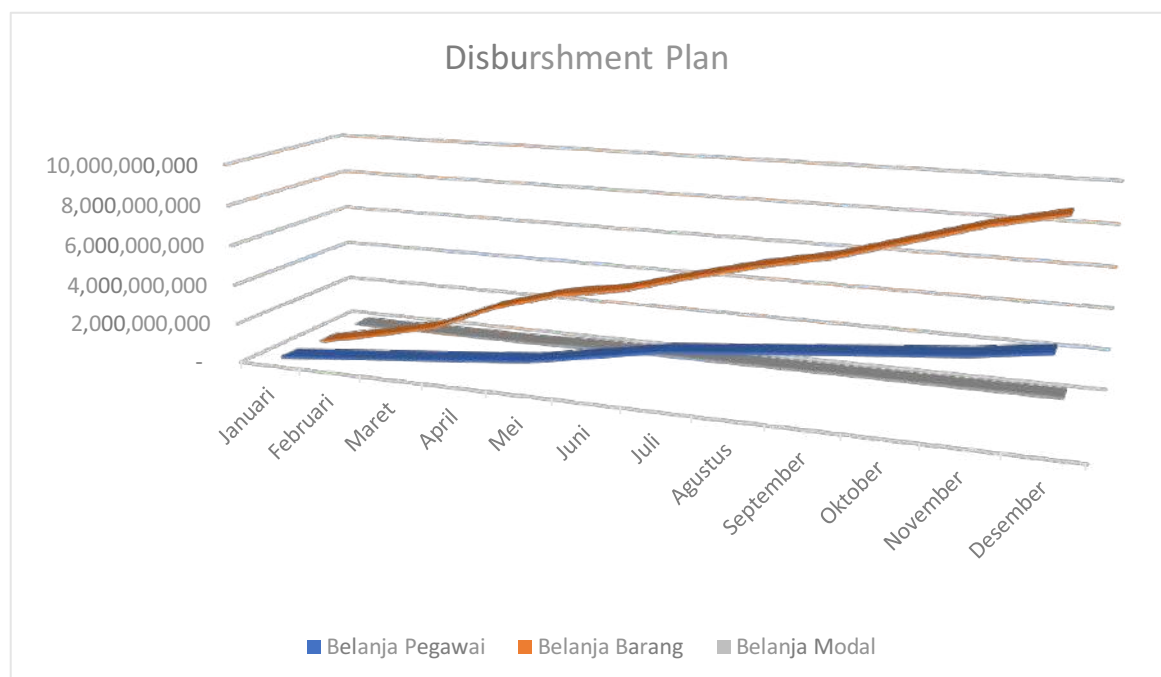
Uraian	2019		%
		Realisasi	
Belanja Pegawai	Rp	4,166,721,926	97.80%
Belanja Barang	Rp	9,475,163,144	98.24%
Belanja Modal	Rp	129,202,963	98.25%
Total	Rp	13,771,088,033	98.11%

Tabel 3.36. Perbandingan Jumlah Realisasi Per Jenis Belanja tahun 2015 – 2019



Gambar 3.19. Grafik Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2015 - 2019

Agar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2019 lebih fokus, efektif dan efisien, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar membuat rencana penyerapan anggaran (*disbursement plan*) mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2019. Rencana penyerapan anggaran tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 3.20 Grafik *Disbursement Plan* Tahun 2019

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika Ditjen SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu UPT Ditjen SDPPI, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar senantiasa bekerja dengan mengacu pada kinerja yang telah ditetapkan dan mendukung misi Ditjen SDPPI, yaitu mewujudkan tatanan spektrum frekuensi radio yang efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis wireless broadband.

Tahun 2019, target kinerja yang telah ditetapkan untuk Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menjadi pedoman kerja dan prinsip dasar pelayanan prima kepada para pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas layanan telekomunikasi khususnya telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio (nirkabel) yang merupakan sumber daya terbatas milik negara yang saat ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar menyadari banyaknya tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat informatika, mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar di masyarakat menuntut peningkatan kemampuan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar kepada para pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah kerjanya.

Berdasarkan penetapan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar tahun 2019, telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama dan 17 indikator kinerja yang menjadi penilaian dalam penetapan capaian indikator utama tersebut.

Capaian dari masing-masing indikator kinerja secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, yang dapat dilihat dari nilai capaian masing-masing indikator yang melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian halnya dengan kinerja pada bagian keuangan yang menunjukkan realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 13.771.088.033,- atau sebesar 98,11% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 14.036.578.000,-

Laporan Kinerja (LAKIN) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui dan menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar. LAKIN ini menggunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian telah diuraikan secara deskriptif sehingga diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan masukan terhadap LAKIN ini. Dengan demikian, LAKIN ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.







KEMKOMINFO

Koordinasi Antar Seksi





Penertiban Nasional Tahun 2019



Penertiban Frekuensi Radio



Ujian Amatir Radio (UNAR) di Kabupaten Malili



Ujian Amatir Radio (UNAR) di Kabupaten Soppeng



Pembukaan Maritim On The Spot (MOTS)



Sosialisasi dan Koordinasi terkait Maritim On The Spot di Kab. Takalar



Sosialisasi Penggunaan Frekuensi Radio di Kota Makassar (Paotere)



Sosialisasi Penggunaan Frekuensi Radio di Kabupaten Sinjai



BIMTEK PENDAFTARAN UNAR ONLINE



Peluncuran Ujian Amatir Radio (UNAR) Berbasis *Computer Assisted Testing (CAT)*





RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN RENCANA PENERTIBAN NASIONAL



RAPAT KERJA APJII WIL. SUL-SEL

RAPAT EVALUASI GANGGUAN FREKUENSI PENERBANGAN





**KUNJUNGAN KERJA MENKOMINFO KE MAKASSAR
(23 JULI 2019)**



KUNJUNGAN KERJA BAPAK DIRJEN SDPPI KE MAKASSAR



KUNJUNGAN KERJA BAPAK KABAGUM DAN KEPEGAWAIAN DITJEN SDPPI



**KUNJUNGAN DPRD KAB. LUWU UTARA
TERKAIT PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO**

**PENANDATANGAN BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN INSPEKSI (VALIDASI DATA)
DENGAN OPERATOR SELULER**



PERINGATAN HARI BAKTI POSTEL KE – 74 TAHUN 2019



Car Free Day



POSKO MONITORING IDUL FITRI



PEMBINAAN MENTAL DAN DISIPLIN PEGAWAI



Piagam Penghargaan IFaS- Fest Tahun 2019





